

SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN
DALAM LAPORAN PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA DI
KOPERASI AMANAH MULIA IKHLAS
KABUPATEN PINRANG**



OLEH

NUR AZIZAH

NIM: 2220203862201047

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN
DALAM LAPORAN PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA DI
KOPERASI AMANAH MULIA IKHLAS
KABUPATEN PINRANG**



OLEH

NUR AZIZAH

NIM.2220203862201047

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Terapan
Akuntansi (S.Tr.Ak) pada Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban
dalam Laporan Pembagian Sisa Hasil Usaha di
Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Nur Azizah

Nomor Induk Mahasiswa : 2220203862201047

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Nomor : B-2938/In.39/FEBl.04/PP.00.9/06/2025

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Rini Purnamasari, S.E., M.Ak.
NIP : 199001242023212036

(.....)

Mengetahui:

Dekan

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



Dr. Andi Bahri S., M.E., M.Fil.I.

NIP-197811012009121003

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban dalam Laporan Pembagian Sisa Hasil Usaha di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Nur Azizah

Nomor Induk Mahasiswa : 2220203862201047

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Nomor : B-2938/In.39/FEBI.04/PP.00.9/06/2025

Tanggal Ujian : 25 Mei 2026

Disahkan oleh Komisi Penguji

Rini Purnamasari, S.E., M.Ak.	(Ketua)	(.....)
Prof. Dr. Hj. St. Aminah Azis, M.Pd.	(Anggota)	(.....)
Rismala, S.E., M.Ak.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:



Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Dr. Anshari Bahri S. M.E., M.Fil.L.
NIP 197811012009121003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis haturkan ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan karya tulis ini sebagai salah satu persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Terapan Akuntansi (S.Tr.Ak) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan penelitian ini masih banyak ditemui berbagai kendala dan keterbatasan, namun berkat doa, dorongan, serta bantuan dari berbagai pihak, seluruh proses tersebut dapat dilalui hingga karya tulis ini dapat diselesaikan dengan baik.

Dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis mempersembahkan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Nahara dan Ayahanda Jasmin yang senantiasa memberikan kasih sayang doa, motivasi, dan dukungan kepada penulis selama menempuh pendidikan. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Ibu Rini Purnamasari, S.E., M.Ak. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, saran, serta bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

Selain itu, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras dalam mengelola, mengembangkan, serta meningkatkan kualitas pendidikan di lingkungan IAIN Parepare. Berkat kepemimpinan beliau, penulis dapat merasakan lingkungan akademik yang kondusif, sehingga proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.
2. Bapak Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, atas pengabdianannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Ibu Ira Sahara S.E., M.Ak. selaku Ketua Prodi Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan bantuan selama penulis menempuh studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Ibu Prof. Dr. Hj. St. Aminah Azis, M.Pd. dan Ibu Rismala, S.E., M.Ak. yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran yang membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
5. Pimpinan serta seluruh jajaran pengurus dan anggota Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Pinrang yang telah mengizinkan dan memberikan data serta informasi terkait penelitian.
6. Jajaran staf administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta staf Akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
7. Kepada sahabat tercinta penulis, Nur Zam Sabila dan Nurul An'nisa Rahman, yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, serta menjadi tempat berbagi cerita dan motivasi selama proses penyusunan skripsi.
8. Keluarga besar Ma'had Al-Jami'ah IAIN Parepare, terkhusus Isma, Yusma, Rahmi, Tita, Tika, dan Fahri, yang senantiasa memberikan kebersamaan, dukungan, serta semangat kepada penulis selama menjalani masa perkuliahan. Lingkungan yang penuh kekeluargaan dan kebersamaan tersebut menjadi salah satu faktor yang membantu penulis dalam menghadapi berbagai tantangan hingga proses penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
9. Teman-teman seperjuangan Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, khususnya geng *Sweet D'khara*, Darul, Hamdan, Resky, Astri, dan Kurnia, atas dukungan, kebersamaan, dan motivasi yang telah diberikan selama proses perkuliahan hingga penyelesaian penelitian ini.
10. Masyarakat Desa Rampunan dan teman-teman KKN atas segala doa, dukungan, harapan, serta kebersamaan yang telah diberikan kepada penulis selama pelaksanaan kegiatan KKN sehingga menjadi pengalaman dan kenangan yang berkesan.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi bantuan, baik moril maupun material kepada penulis selama kuliah hingga penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga Allah Swt. berkenan menilai segala kebaikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

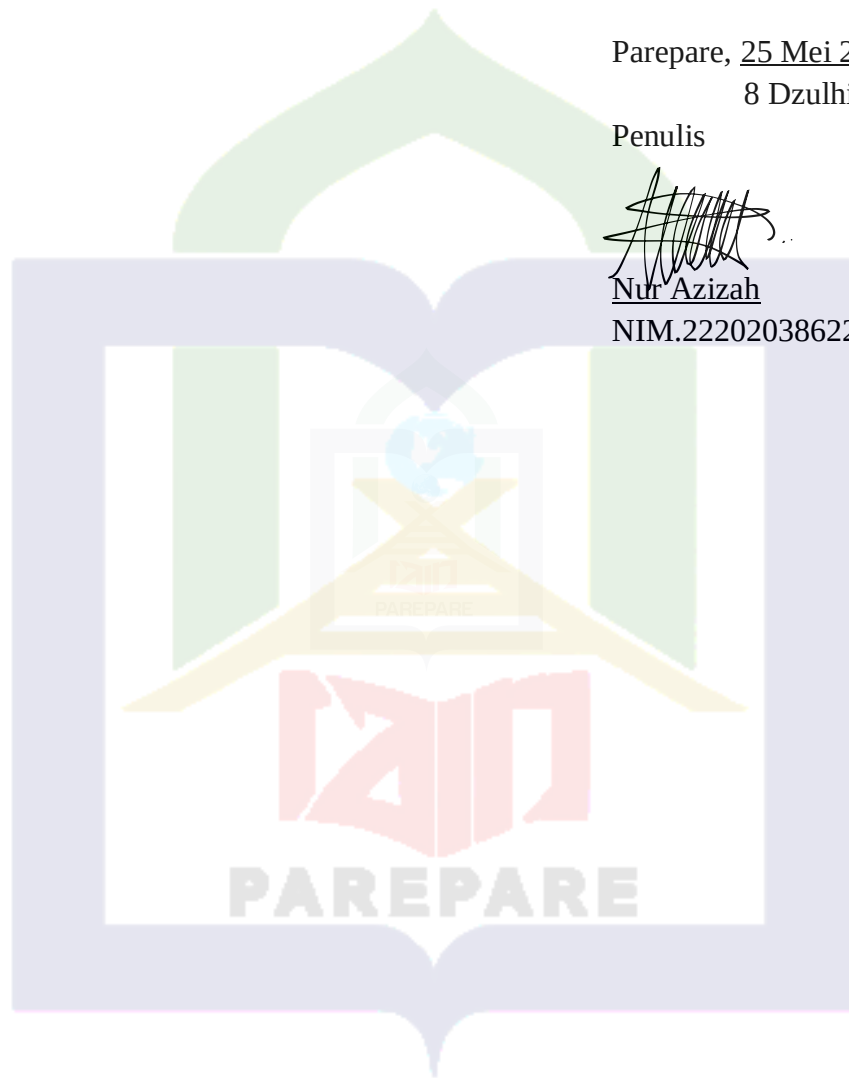
Parepare, 25 Mei 2026 M
8 Dzulhijjah 1447 H

Penulis



Nur Azizah

NIM.2220203862201047



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Azizah
NIM : 2220203862201047
Tempat, Tgl. Lahir : Kamp. Baru, 12 September 2004
Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban
dalam Laporan Pembagian Sisa Hasil Usaha di Koperasi
Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagai atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 25 Mei 2026

Penyusun



Nur Azizah

NIM. 2220203862201047

ABSTRAK

Nur Azizah, *Analisis Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban dalam Laporan Pembagian Sisa Hasil Usaha di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang.* (dibimbing oleh Rini Purnamasari)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas laporan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) pada koperasi. Dalam praktiknya, masih ditemukan beberapa kendala, seperti belum jelasnya pemisahan biaya terkendali dan tidak terkendali, belum tersusunnya indikator kinerja yang terstruktur, serta perbedaan pemahaman anggota mengenai pembagian SHU. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi efektivitas pengelolaan koperasi dan tingkat kepercayaan anggota terhadap laporan SHU. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam laporan pembagian SHU, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta menganalisis upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas laporan SHU pada Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan pada pengurus serta anggota koperasi. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam penyusunan dan pembagian SHU serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang telah menerapkan akuntansi pertanggungjawaban melalui struktur organisasi yang jelas, pembagian tugas dan wewenang, penyusunan anggaran, penggunaan aplikasi pencatatan keuangan, serta penyampaian laporan SHU melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT). Namun, penerapannya belum optimal karena masih terdapat kendala dalam pemisahan biaya terkendali dan tidak terkendali, penyusunan indikator kinerja, serta pemahaman anggota terhadap perhitungan SHU. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas antara lain melalui keterbukaan informasi serta penyampaian laporan keuangan dan SHU secara rutin kepada anggota.

Kata Kunci: Akuntansi Pertanggungjawaban, Sisa Hasil Usaha (SHU), Transparansi, Akuntabilitas, Koperasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	8
B. Tinjauan Teori	13
1. Teori Stakeholder	13
2. Teori Akuntabilitas Publik.....	14
3. Teori Akuntansi Pertanggungjawaban (<i>Responsibility Accounting</i>).....	14
4. Konsep Sisa Hasil Usaha (SHU).....	24
C. Kerangka Konseptual.....	30
D. Kerangka Berpikir	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	34
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	34

B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	34
C. Fokus Penelitian	35
D. Jenis dan Sumber Data.....	35
E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data	36
F. Uji Keabsahan Data	37
G. Teknik Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Sejarah Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Pinrang	41
B. Struktur Organisasi	43
C. Hasil Penelitian.....	44
D. Pembahasan Hasil Penelitian	56
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	I
BIODATA PENULIS	XXIV

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1	Laporan Laba Rugi Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Tahun 2021-2025	3
4.1	Persentase Pembagian SHU Tahun Buku 2025	51



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	32
4.1	Bagan Struktur Organisasi Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Pinrang	42



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Keterangan Penetapan Pembimbing	II
2	Berita Acara Revisi Judul Skripsi	III
3	Surat Izin Meneliti dari Kampus	IV
4	Surat Izin Meneliti dari DPMPTSP	V
5	Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Koperasi	VI
6	Surat Keterangan Wawancara	VII
7	Instrumen Wawancara	XI
8	Transkrip Wawancara	XIV
9	Dokumentasi Wawancara	XXIV

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(‘).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dhommah	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
أَوَّ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلَ : Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَيَّ / نَا	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إَيَّ	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
أَوَّ	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

			atas
--	--	--	------

Contoh :

مات	: māta
رمى	: ramā
قيل	: qīla
يموت	: yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *tamarbutah* ada dua:

- Tamarbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- Tamarbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *tamarbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tamarbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: rauḍahal-jannah atau rauḍatul jannah
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: al-madīnahal-fāḍilah atau al-madīnatulfāḍilah
الْحِكْمَةُ	: al-hikmah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: Rabbanā
نَجَّيْنَا	: Najjainā
الْحَقُّ	: al-haqq
الْحَجُّ	: al-hajj

نُعَم : *nu‘ima*

عُدُو : *‘aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِي : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِي : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْعُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fīzilālal-qur'an

Al-sunnahqablal-tadwin

Al-ibāratbi 'umum al-lafzlābi khusus al-sabab

9. *Lafzal-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاِلهِ *billah*

Adapun *tamarbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafzal-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Humfirahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal

kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa mā Muhammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwudi ‘alinnāsilladhībīBakkatamubārakan

Syahru Ramadan al-ladhūnzilafihal-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

AbūNasral-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abūal-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abūal-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abūal-Walid Muhammad Ibnu)

NaṣrḤamīdAbū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, NaṣrḤamīd (bukan:Zaid, NaṣrḤamīdAbū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahūwata‘āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wasallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص = صفحة

دم = بدون

صلعم = صلى الله عليه وسلم

ط = طبعة

بن = بدون ناشر

الخ = إلى آخرها / إلى آخره

ج = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

Ed : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan lembaga yang mampu menumbuhkan semangat kerja sama dan saling membantu merupakan kebutuhan penting bagi kehidupan ekonomi masyarakat. Pada konteks inilah koperasi hadir sebagai wadah yang menumbuhkan solidaritas ekonomi sekaligus menyediakan ruang bagi anggota untuk berkembang melalui kegiatan usaha bersama. Menurut Carunia, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum yang kegiatannya dilandaskan pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berasaskan kekeluargaan.¹ Definisi tersebut menegaskan bahwa koperasi bukan sekadar entitas bisnis, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang kuat dalam mendukung kesejahteraan anggota. Oleh karena itu, koperasi harus dikelola secara profesional, tidak hanya dalam aspek pengelolaan usaha, tetapi juga melalui penerapan fungsi manajerial, sistem akuntansi, dan sistem informasi yang memadai guna mewujudkan tata kelola yang efektif dan akuntabel.

Secara hukum koperasi di Indonesia beroperasi dalam kerangka regulatif yang ditetapkan oleh negara. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menegaskan bahwa koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-perorangan atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan pada prinsip koperasi dan asas kekeluargaan.² Dalam praktiknya, koperasi tidak hanya menyediakan akses keuangan melalui kegiatan simpan pinjam, tetapi juga berperan dalam mendorong usaha produktif bagi anggotanya untuk meningkatkan taraf hidup. Pada daerah seperti Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, koperasi menjadi instrumen vital dalam menggerakkan perekonomian lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

¹ Carunia Mulya, "Koperasi Dalam Sistem Perekonomian Indonesia". Yayasan Pustaka Obor Indonesia. (Jakarta, 2018).

² Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, Tentang Perkoperasian, Pasal 33 Ayat 1, n.d.

Seiring berkembangnya koperasi dan meningkatnya aktivitas usaha, tuntutan terhadap penguatan sistem pengelolaan manajemen menjadi sangat besar. Pertumbuhan koperasi memunculkan tanggung jawab manajerial yang lebih kompleks, seperti memastikan keberlanjutan usaha, memaksimalkan surplus hasil usaha, mendorong pertumbuhan anggota, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh pemangku kepentingan. Dalam kondisi tersebut, manajemen membutuhkan informasi yang akurat menjadi sangat penting, tidak hanya sebagai alat pencatatan, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian, evaluasi, dan pertanggungjawaban.

Salah satu sistem akuntansi yang sangat relevan dalam mendukung tata kelola koperasi adalah akuntansi pertanggungjawaban. Sistem ini dirancang untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, dan melaporkan biaya serta pendapatan berdasarkan pusat-pusat pertanggungjawaban dalam organisasi.³ Dengan memecah organisasi ke dalam unit-unit kecil yang memiliki tugas dan fungsi spesifik, akuntansi pertanggungjawaban membantu memperjelas siapa yang bertanggungjawab atas setiap aktivitas, memudahkan pengendalian, serta meningkatkan akuntabilitas internal.⁴ Dalam teori akuntansi manajemen, setiap pusat pertanggungjawaban baik pusat biaya, pusat laba, maupun pusat investasi dituntut untuk memiliki laporan kinerja yang diberikan.⁵ Jika diterapkan dalam koperasi, sistem ini dapat membantu pengurus menunjukkan bagaimana kontribusi anggota diterjemahkan ke dalam pembagian Sisa Hasil Usaha, serta memberikan laporan yang transparan kepada anggota.

Konteks tersebut relevan dengan kondisi yang terjadi pada Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang. Koperasi ini merupakan salah satu koperasi aktif di Kabupaten Pinrang yang bergerak dalam kegiatan simpan pinjam

³ Mulyadi, "Akuntansi Manajemen". (Jakarta: Salemba Empat, 2016).

⁴ Hansen dan Mowen, "*Cost Management: Accounting and Control*" (USA: South-Western, 2005). Hal. 412.

⁵ Sofyan Syafri Harahap, "Akuntansi Manajemen" (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).

serta usaha produktif. Pertumbuhan jumlah anggota dan volume usaha menjadikan kebutuhan akan pelaporan keuangan yang transparan semakin mendesak, terutama pada bagian penyusunan dan pembagian Sisa Hasil Usaha. Sisa Hasil Usaha merupakan selisih antara pendapatan koperasi dan seluruh biaya operasional, beban penyusutan, kewajiban, serta pajak dalam satu periode buku. Pelaporan Sisa Hasil Usaha bukan sekadar kegiatan administratif, tetapi merupakan bentuk pertanggungjawaban pengurus kepada anggota sebagai pemilik koperasi sekaligus refleksi kontribusi anggota terhadap keberhasilan koperasi.

Sebagai dasar pemahaman mengenai kondisi usaha koperasi, data laporan laba rugi menunjukkan bahwa kinerja Koperasi Amanah Mulia Ikhlas dalam lima tahun terakhir berada pada tren yang positif. Pendapatan dan laba bersih cenderung meningkat setiap tahun, meskipun beban operasional mengalami fluktuasi. Secara keseluruhan, perkembangan ini mencerminkan bahwa usaha koperasi berjalan stabil dan menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik.

**Tabel 1.1 Laporan Laba Rugi Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Tahun
2021-2025**

Tahun	Total Pendapatan (Rp)	Total Beban (Rp)	Laba Bersih (Rp)
2021	1.130.751.586,25	499.196.064,00	631.555.522,25
2022	1.094.817.250,00	424.255.402,00	670.561.848,00
2023	1.255.907.856,44	343.154.188,47	912.753.667,97
2024	1.370.301.828,75	406.566.322,69	963.735.506,06
2025	1.621.141.384,90	404.606.878,51	1.216.534.506,39

Sumber: Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa kinerja usaha koperasi relatif stabil dan menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik. Namun demikian, data laba rugi di atas belum menunjukkan bagaimana laba bersih dialokasikan ke dalam komponen Sisa Hasil Usaha seperti cadangan, jasa modal, jasa usaha, dana sosial, dan dana pendidikan. Selain itu, berdasarkan observasi awal, koperasi telah

menggunakan sistem berbasis aplikasi dalam pencatatan dan penyusunan laporan keuangan, termasuk dalam perhitungan Sisa Hasil Usaha. Meskipun demikian, informasi yang dihasilkan dari sistem tersebut masih perlu dikaji lebih lanjut, khususnya dalam hal penyajian laporan yang sesuai dengan prinsip akuntansi pertanggungjawaban serta bagaimana tingkat pemahaman anggota terhadap informasi yang disampaikan.

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara konsep ideal akuntansi pertanggungjawaban dengan praktik di lapangan. Walaupun secara keuangan koperasi mencatat laba yang cukup besar, namun belum dapat diketahui secara pasti sejauh mana pelaporan Sisa Hasil Usaha telah mencerminkan pola pelaporan yang komprehensif sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban. Situasi ini sejalan dengan berbagai penelitian terdahulu. Penelitian oleh Nadya Vita Safitri pada KSPPS Binama Cabang Tlogasari juga mengungkapkan bahwa meskipun struktur organisasi dan anggaran telah mengadopsi prinsip akuntansi pertanggungjawaban, masih terdapat pembagian tanggung jawab yang kurang proporsional dan evaluasi kinerja yang belum optimal. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi pertanggungjawaban masih menghadapi tantangan di berbagai lembaga koperasi, baik syariah maupun non-syariah.⁶

Penelitian lain yang dilakukan oleh Mutia, dkk. 2026 pada KSP Kopdit Hiro Heling menunjukkan bahwa penerapan akuntansi pertanggungjawaban belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan karena beberapa syarat dalam akuntansi pertanggungjawaban belum diterapkan secara memadai, seperti belum adanya pemisahan yang jelas antara biaya terkendali dan tidak terkendali serta masih terdapat kelemahan dalam sistem pelaporan dan struktur organisasi yang belum sepenuhnya terdesentralisasi. Kondisi tersebut berdampak pada kurang optimalnya penilaian kinerja pusat pertanggungjawaban dalam koperasi.

⁶ Nadya Vita Safitri, "Analisis Akuntansi Pertanggungjawaban Dalam Penilaian Kinerja Pusat Pendapatan Dan Biaya Pada KSPPS Binama Cabang Tlogasari", 2022.

Penelitian lain oleh Doko, dkk, pada KSU Talenta Kupang menegaskan bahwa lemahnya mekanisme pertanggungjawaban berdampak pada ketidakefektifan pengelolaan dana dan besaran Sisa Hasil Usaha yang dihasilkan. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi pertanggungjawaban merupakan tantangan yang tidak hanya terjadi pada satu koperasi, tetapi juga pada berbagai lembaga koperasi lainnya.⁷

Ketiga penelitian tersebut secara garis besar memperlihatkan bahwa tantangan utama koperasi terletak pada lemahnya penerapan akuntansi pertanggungjawaban, baik dalam aspek penyusunan anggaran, pemisahan biaya, maupun pelaporan kinerja unit. Kondisi tersebut sejalan dengan fenomena yang terjadi pada Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang, sehingga memperkuat urgensi untuk melakukan kajian mendalam terhadap penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam penyusunan laporan Sisa Hasil Usaha.

Melihat berbagai persoalan tersebut tampak jelas bahwa diperlukan penelitian lebih mendalam mengenai bagaimana sistem akuntansi pertanggungjawaban diterapkan dalam penyusunan dan pembagian Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang. Meskipun koperasi telah menunjukkan kinerja keuangan yang baik serta didukung oleh sistem pengelolaan yang memadai, masih diperlukan kajian untuk memahami bagaimana penerapan tersebut dalam praktik. Hal ini penting mengingat Sisa hasil usaha merupakan bentuk pertanggungjawaban koperasi kepada anggota, sehingga kejelasan dalam penyusunan, penyajian, dan pemahamannya perlu diperhatikan guna mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan koperasi.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini berjudul “Analisis Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban dalam Laporan Pembagian Sisa Hasil Usaha di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang.”

⁷ Doko, dkk, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sisa Hasil Usaha (SHU) Di KSU Talenta Kupang,” no.25:1505-17.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akuntansi pertanggungjawaban pada penyusunan dan pembagian Sisa Hasil Usaha di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana upaya dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan pembagian Sisa Hasil Usaha di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang?
3. Bagaimana kendala dalam menerapkan akuntansi pertanggungjawaban terhadap pelaporan Sisa Hasil Usaha di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam penyusunan dan pembagian Sisa Hasil Usaha di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang.
2. Untuk menganalisis upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan pembagian Sisa Hasil Usaha melalui penerapan akuntansi pertanggungjawaban di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang.
3. Untuk mengidentifikasi kendala dalam penerapan akuntansi pertanggungjawaban di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi, khususnya terkait penerapan akuntansi

pertanggungjawaban dalam penyusunan dan pembagian Sisa Hasil Usaha pada koperasi, serta dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan akuntansi koperasi.

2. Manfaat Praktis

a. Koperasi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran terkait berbagai kendala dalam penerapan akuntansi pertanggungjawaban pada pelaporan Sisa Hasil Usaha, sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi bagi pengelola Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang dalam upaya meningkatkan sistem pengelolaan serta pelaporan keuangan yang lebih efektif dan optimal.

b. Penulis dan Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas laporan pembagian Sisa Hasil Usaha melalui penerapan akuntansi pertanggungjawaban, serta menjadi tambahan wawasan bagi peneliti, akademisi, dan pihak lain yang tertarik pada pengelolaan keuangan koperasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan pustaka mencakup berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Bagian ini menyajikan ringkasan hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian mengenai penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam laporan pembagian Sisa Hasil Usaha pada koperasi. Penelitian ini bukanlah penelitian pertama yang membahas mengenai akuntansi pertanggungjawaban, peneliti memanfaatkan beragam referensi sebagai acuan yang berkaitan dengan skripsi yang disusun, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nadya Vita Safitri 2022 berjudul “Analisis Akuntansi Pertanggungjawaban dalam Penilaian Kinerja Pusat Pendapatan dan Biaya pada KSPPS Binama Cabang Tlogasari”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi pertanggungjawaban pada KSPPS Binama sebagian besar sudah sesuai dengan teori, meskipun masih ditemukan ketidakefisienan pada pembagian tanggung jawab antar manajer pusat dan kurang optimalnya evaluasi kinerja berdasarkan laporan biaya serta pendapatan optimal.⁸

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, yaitu mengkaji penerapan akuntansi pertanggungjawaban pada lembaga koperasi simpan pinjam serta menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis sejauh mana sistem pertanggungjawaban diterapkan dalam konteks pengelolaan keuangan koperasi.

Perbedaannya terletak pada objek penelitian. Jika penelitian Nadya menekankan pada penilaian kinerja pusat pendapatan dan biaya, penelitian ini lebih menyoroti penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam laporan pembagian Sisa Hasil Usaha sebagai indikator transparansi dan keadilan bagi

⁸ Nadya Vita Safitri, “Analisis Akuntansi Pertanggungjawaban Dalam Penilaian Kinerja Pusat Pendapatan Dan Biaya Pada KSPPS Binama Cabang Tlogasari.” 2022.

anggota koperasi. Selain itu, penelitian ini dilakukan pada Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang, yang beroperasi di wilayah pedesaan dengan karakteristik sosial ekonomi berbeda dari KSPPS Binama di Semarang. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman tentang implementasi akuntansi pertanggungjawaban dalam konteks pembagian hasil usaha koperasi berbasis komunitas.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Mutia, dkk. 2026 berjudul “Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban dalam Penilaian Kinerja pada KSP Kopdit Hiro Heling”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi pertanggungjawaban pada KSP Kopdit Hiro Heling belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan karena beberapa syarat akuntansi pertanggungjawaban belum diterapkan secara memadai, seperti belum adanya pemisahan yang jelas antara biaya terkendali dan tidak terkendali serta masih terdapat kelemahan dalam sistem pelaporan dan struktur organisasi yang belum sepenuhnya terdesentralisasi. Kondisi tersebut berdampak pada kurang optimalnya penilaian kinerja pusat pertanggungjawaban dalam koperasi.⁹

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, yaitu mengkaji penerapan akuntansi pertanggungjawaban pada lembaga koperasi serta menggunakan pendekatan kualitatif dalam menganalisis sistem pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan koperasi.

Perbedaannya, lebih menekankan pada penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam penilaian kinerja pusat pertanggungjawaban, khususnya pusat pendapatan dan pusat biaya. Sementara itu, penelitian ini lebih menyoroti penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam laporan pembagian Sisa Hasil Usaha sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban koperasi kepada anggota. Selain itu, penelitian ini dilakukan pada Koperasi Amanah

⁹ Mutia, dkk. “Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban dalam Penilaian Kinerja pada KSP Kopdit Hiro Heling.” Universitas Nusa Nipa, Indonesia” 13, no. 1 (2026): 220–41.

Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang, yang memiliki karakteristik operasional dan lingkungan organisasi yang berbeda dengan KSP Kopdit Hiro Heling. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam konteks pembagian hasil usaha koperasi.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Febriyanti S. T. Doko, dkk, 2024 berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sisa Hasil Usaha di KSU Talenta Kupang” tujuan penelitian ini Adalah untuk menganalisis pengaruh jumlah anggota, simpanan saham, simpanan non-saham, serta jumlah pinjaman terhadap besarnya Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial jumlah anggota, simpanan saham, dan simpanan non-saham tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap SHU, sedangkan jumlah pinjaman memiliki pengaruh negative dan signifikan. Sementara itu, secara simultan keempat variable tersebut berpengaruh signifikan terhadap SHU. Temuan ini mengindikasikan bahwa besarnya SHU dipengaruhi oleh Tingkat partisipasi anggota serta efektivitas pengelolaan dana koperasi.¹⁰

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu berfokus pada Sisa Hasil Usaha sebagai objek utama analisis dalam konteks koperasi. Keduanya juga menyoroti pentingnya partisipasi anggota dan tata kelola keuangan yang akuntabel untuk mencapai pembagian Sisa Hasil Usaha yang adil dan transparan. Selain itu, penelitian Doko dkk. Menegaskan bahwa keberhasilan pembagian Sisa Hasil Usaha tidak hanya bergantung pada faktor keuangan, tetapi juga efektivitas manajerial dan kualitas pertanggungjawaban, yang selaras dengan prinsip akuntansi pertanggungjawaban yang menjadi dasar penelitian ini.

¹⁰ Doko, dkk, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sisa Hasil Usaha (SHU) Di KSU Talenta Kupang,” no.25:1505-17.

Perbedaannya, penelitian Doko menggunakan pendekatan kuantitatif untuk melihat pengaruh variabel finansial terhadap Sisa Hasil Usaha, sementara penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang menitikberatkan pada bagaimana akuntansi pertanggungjawaban diterapkan dalam proses pelaporan dan pembagian Sisa Hasil Usaha. Dengan demikian, penelitian ini melengkapi penelitian sebelumnya dengan memberikan perspektif mengenai akuntabilitas dan keadilan dalam pelaporan Sisa Hasil Usaha, bukan hanya analisis hubungan numerik antar variabel keuangan.

4. Penelitian keempat dilakukan oleh Idola Vanniko Sinambela pada Tahun 2022 berjudul “Akuntansi Pertanggungjawaban pada Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri Cabang Medan.” Hasil Penelitian menunjukkan bahwa koperasi telah menerapkan beberapa unsur akuntansi pertanggungjawaban, antara lain struktur organisasi, pembagian tugas, serta penyusunan anggaran. Akan tetapi, penerapannya masih belum berjalan secara optimal karena pemisahan antara biaya terkendali dan tidak terkendali belum dilakukan dengan jelas, serta laporan pertanggungjawaban yang disusun belum sepenuhnya mencerminkan kinerja setiap unit secara objektif. Kondisi tersebut berdampak pada belum maksimalnya proses evaluasi kinerja dan tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan koperasi.¹¹

Persamaan penelitian Sinambela dengan penelitian ini terletak pada fokus keduanya dalam menelaah penerapan akuntansi pertanggungjawaban pada lembaga koperasi sebagai instrumen pengendalian dan akuntabilitas terutama melalui aspek struktur organisasi, penyusunan anggaran, pembagian wewenang, dan pelaporan kinerja.

Perbedaannya, penelitian Sinambela berorientasi pada penilaian efektivitas pengendalian biaya dan kinerja unit secara internal, sedangkan

¹¹ Idola Vanniko Sinambela, “Akuntansi Pertanggungjawaban pada Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri Cabang Medan”. (Medan: Universitas HKBP Nommensen, 2022)

penelitian ini menitikberatkan pada penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam penyusunan laporan pembagian Sisa Hasil Usaha sebagai bentuk pertanggungjawaban eksternal kepada anggota. Penelitian ini juga memperluas ruang lingkup dengan menilai bagaimana informasi pertanggungjawaban mendukung transparansi perhitungan kontribusi anggota dan keadilan pembagian Sisa Hasil Usaha, sehingga cakupannya lebih luas dibanding penelitian Sinambela yang berfokus pada evaluasi unit internal.

5. Penelitian kelima dilakukan oleh Endang Wahyuningsih pada Tahun 2022 melalui karya ilmiah berjudul “Alokasi dan Pembagian Sisa Hasil Usaha kepada Anggota sesuai Prinsip-Prinsip Koperasi.” Penelitian ini menitikberatkan pada analisis penetapan, perhitungan, serta distribusi Sisa Hasil Usaha (SHU) yang mengacu pada koperasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian SHU tidak sekadar menjadi kewajiban administratif, melainkan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban koperasi kepada anggota maupun pihak terkait. Di samping itu, proses pembagian SHU harus mencerminkan prinsip keterbukaan, keadilan, serta menggambarkan tingkat efektivitas dan efisiensi operasional koperasi.¹²

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan penulis terletak pada fokus kajian mengenai mekanisme perolehan dan pembagian Sisa Hasil Usaha dalam koperasi sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi organisasi. Keduanya menyoroti pentingnya kejelasan perhitungan Sisa Hasil Usaha, peran partisipasi anggota, serta kepatuhan pada prinsip-prinsip keadilan, keterbukaan, dan pertanggungjawaban.

Perbedaannya, penelitian Wahyuningsih bersifat normatif-teoretis karena menekankan bagaimana Sisa Hasil Usaha seharusnya dihitung dan dibagi sesuai regulasi serta memberikan contoh format perhitungan. Sebaliknya, penelitian ini

¹² Endang Wahyuningsih, “Alokasi Dan Pembagian Sisa Hasil Usaha Kepada Anggota Sesuai Prinsip-Prinsip Koperasi,” 2022.

menelaah penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam praktik nyata penyusunan laporan pembagian Sisa Hasil Usaha di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang, dengan menilai kesesuaian praktik dengan teori, efektivitas pelaksanaannya, serta persepsi dan kepuasan anggota. Penelitian ini juga memposisikan akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat pengendalian manajemen, bukan sekadar prosedur perhitungan Sisa Hasil Usaha.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Stakeholder

Menurut teori stakeholder Freeman, stakeholder adalah individu atau kelompok yang memiliki kemampuan untuk dipengaruhi dan dipengaruhi oleh pencapaian tujuan suatu organisasi. Menurut teori ini, organisasi bertanggungjawab terhadap semua orang yang terlibat dalam operasi organisasi, bukan hanya pemilik modal. Oleh karena itu, kelangsungan hidup organisasi sangat ditentukan oleh kemampuan untuk mengelola dan mempertahankan hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan.¹³

Dalam perkembangannya, teori ini menegaskan bahwa pengelolaan organisasi yang baik harus mempertimbangkan kepentingan stakeholder secara seimbang guna menciptakan keberlanjutan, menjaga kepercayaan, serta mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aktivitas organisasi.¹⁴

Karakteristik koperasi yang berbasis keanggotaan menjadikan anggota sebagai stakeholder utama, mengingat mereka berfungsi tidak hanya sebagai pemilik, tetapi juga sebagai pengguna layanan koperasi. Oleh sebab itu, pengelolaan dana pelaporan Sisa Hasil Usaha harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Penerapan akuntansi pertanggungjawaban

¹³ R Edward Freeman, *“Strategic Management: A Stakeholder Approach.”* (Boston: Pitman Publishing, 1984).

¹⁴ R. Edward Freeman and Dkk., *“Stakeholder Theory: The State of the Art.”* (Cambridge: Cambridge University Press, 2010).

dalam koperasi dapat dipahami sebagai bentuk tanggung jawab kepada anggota sebagai pemangku kepentingan utama.

2. Teori Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas publik dapat diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah yang menuntut adanya transparansi, keadilan, serta tanggung jawab atas setiap tindakan, keputusan, dan kebijakan yang diambil. Secara konseptual, akuntabilitas publik tidak hanya sebatas keterbukaan informasi, tetapi juga mencakup keterlibatan aktif dalam merespons dan menindaklanjuti setiap permasalahan, serta menyediakan ruang diskusi yang terbuka terhadap berbagai masukan secara cepat dan efektif.¹⁵

Salah satu unsur utama akuntabilitas publik adalah transparansi, yaitu keterbukaan organisasi dalam menyediakan informasi yang benar, jelas, dan tidak menyesatkan. Transparansi mengharuskan laporan tidak hanya menyajikan hasil akhir, tetapi juga menjelaskan proses dan dasar perhitungan yang digunakan. Selain itu, terdapat unsur keterbukaan informasi, yaitu kemudahan akses bagi pihak berkepentingan untuk memperoleh data yang dibutuhkan guna menilai kinerja organisasi.¹⁶

Dalam konteks koperasi, akuntabilitas publik memiliki relevansi yang kuat karena koperasi merupakan badan usaha yang dimiliki oleh anggota. Pengurus bertindak sebagai pengelola yang wajib mempertanggungjawabkan hasil pengelolaan usaha kepada anggota melalui laporan yang transparan. Pelaporan dan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) merupakan bentuk konkret dari akuntabilitas tersebut. Oleh karena itu, penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam koperasi perlu didukung oleh prinsip akuntabilitas publik agar laporan SHU disajikan secara jelas, terbuka, dan dapat dipahami oleh seluruh anggota.

¹⁵ Denny Adhriana, *Akuntabilitas Publik* (Yogyakarta: Deepublish Digital, 2024).

¹⁶ Mardiasmo, "Akuntansi Sektor Publik". (Yogyakarta: Andi, 2018).

3. Teori Akuntansi Pertanggungjawaban (*Responsibility Accounting*)

Salah satu ide dalam akuntansi manajemen adalah akuntansi pertanggungjawaban, yang menghasilkan data formal yang berfokus pada siapa yang bertanggung jawab atas operasi suatu organisasi. Dengan menggunakan akuntansi pertanggungjawaban untuk mengelola pusat biaya, penilaian kinerja setiap pusat pertanggungjawaban dapat dilakukan dengan cara yang lebih objektif. Dalam perkembangannya, teori ini menegaskan bahwa pengelolaan organisasi yang baik harus mempertimbangkan kepentingan stakeholder secara seimbang guna menciptakan keberlanjutan, menjaga kepercayaan, serta mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aktivitas organisasi.

Mulyadi menjelaskan bahwa akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem akuntansi yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan melaporkan pendapatan dan biaya berdasarkan lokasi di mana perusahaan bertanggung jawab. Tujuannya adalah untuk menemukan orang atau kelompok yang ketidaksesuaian antara realisasi dengan anggaran biaya dan pendapatan.¹⁷

a. Tujuan dan Manfaat Akuntansi Pertanggungjawaban

1) Tujuan Akuntansi Pertanggungjawaban

Akuntansi pertanggungjawaban tentunya memiliki tujuan bagi tiap perusahaan yang menerapkannya. Menurut Hansen dan Mowen, “Tujuan akuntansi pertanggungjawaban adalah untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja manajer berdasarkan pusat pertanggungjawaban yang menjadi wewenangnya. Sistem ini memungkinkan organisasi mengendalikan biaya, pendapatan, dan investasi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing unit.”¹⁸

Tujuan dari akuntansi pertanggungjawaban lainnya menurut Hidayat dan Tin adalah sebagai berikut:¹⁹

¹⁷ Mulyadi, "Auditing" (6th edn. Jakarta: Salemba Empat, 2014). Hal 218.

¹⁸ Hansen and Mowen, "*Managerial Accounting: The Cornerstone of Business Decision-Making*", ed. 7 (Cengage Learning, 2016).

¹⁹ Taufik Hidayat dan Se Tin, “Analisis Pengaruh Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Kinerja Manajer Pusat Laba Di Warung Paskal Bandung,” *Akuntansi* 4, nomor 2 (2012): 189.

- a) Dapat digunakan sebagai alat perencanaan untuk menetapkan kriteria penilaian pada unit usaha tertentu.
- b) Menjadi pedoman penting bagi perusahaan dalam menentukan Langkah-langkah untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
- c) Sebagai dasar penilaian kinerja setiap bagian, karena manajemen puncak menerima laporan pertanggungjawaban secara berkala dari setiap tingkat manajemen, sehingga dapat diketahui pencapaian tugas dan target masing-masing.
- d) Membantu manajemen dalam proses pengendalian dengan membandingkan realisasi dan anggaran yang telah ditetapkan untuk mengetahui adanya penyimpangan.

Dari pendapat para ahli di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa tujuan akuntansi pertanggungjawaban adalah memastikan setiap individu atau unit dalam organisasi berkontribusi pada pencapaian tujuan perusahaan. Selain itu, sistem ini berfungsi sebagai alat perencanaan, pedoman pencapaian sasaran, tolak ukur penilaian kinerja, serta membantu manajemen dalam mengendalikan penyimpangan antara anggaran dan realisasi.

2) Manfaat Akuntansi Pertanggungjawaban

Manfaat akuntansi pertanggungjawaban yang dikutip dari buku Mulyadi yaitu:²⁰

- a) Sebagai Pemotivasi Bagi Manajer.

Selain berfungsi sebagai alat untuk menilai prestasi manajer, informasi akuntansi pertanggungjawaban memengaruhi motivasi sistem penghargaan. Manajer akan imotivasi untuk meningkatkan kinerja mereka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

²⁰ Mulyadi, "Akuntansi Biaya," Edisi 5. C (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2018).

b) Sebagai Penilaian Kinerja Manajer Pusat Pertanggungjawaban.

Informasi akuntansi pertanggungjawaban digunakan untuk menilai kinerja manajer pada setiap pusat pertanggungjawaban. Melalui sistem ini, setiap manajer menyusun anggaran pendapatan atau biaya sesuai kewenangannya, kemudian realisasinya dibandingkan dengan rencana, selisih atau penyimpangan menjadi dasar evaluasi untuk melihat efektivitas dan efisiensi manajer dalam mengelola sumber daya.

c) Untuk Mengendalikan Biaya.

Akuntansi pertanggungjawaban memberikan manfaat dalam pengendalian biaya. Dengan penerapannya, alur pengelolaan biaya seperti pengeluaran maupun pemasukan pada setiap bagian Perusahaan dapat terlihat dan terpantau dengan lebih jelas. Hal ini memungkinkan proses pengendalian biaya berjalan secara lebih terarah dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh pihak yang berwenang.

d) Sebagai Alat Pengambilan Keputusan.

Akuntansi pertanggungjawaban menjadi alat pengambilan keputusan karena menyediakan informasi biaya, pendapatan, serta penyimpangan anggaran secara jelas pada tiap unit, sehingga manajemen dapat menentukan tindakan yang tepat.

Dari pendapat Mulyadi di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa akuntansi pertanggungjawaban bermanfaat sebagai alat untuk memotivasi manajer, menilai kinerja pada setiap pusat pertanggungjawaban, mengendalikan biaya secara lebih terarah, serta membantu manajemen dalam mengambil keputusan berdasarkan informasi biaya, pendapatan, dan penyimpangan anggaran yang jelas.

c. Syarat-syarat Sistem Akuntansi Pertanggungjawaban

Menurut Mulyadi ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebelum menerapkan akuntansi pertanggungjawaban di perusahaan. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:²¹

1) Struktur Organisasi

Akuntansi pertanggungjawaban harus memiliki struktur yang dapat menunjukkan tanggung jawab, wewenang, dan posisi setiap unit kerja di setiap tingkat manajemen. Selain itu, struktur tersebut juga perlu menggambarkan pembagian tugas yang terperinci agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan. Organisasi disusun sedemikian rupa sehingga setiap pimpinan memiliki batas tanggung jawab yang tegas. Dengan demikian, wewenang mengalir dari tingkat manajemen atas ke bawah, sedangkan pertanggungjawaban berjalan dari tingkat bawah ke atas.

2) Anggaran

Anggaran mencerminkan rencana kerja manajer dan dasar penilaian kinerja, sehingga setiap pusat pertanggungjawaban harus terlibat dalam prosesnya. Dengan keterlibatan tersebut, anggaran dapat lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing.

3) Penggolongan Biaya

Karena tidak mungkin bagi satu orang untuk mengendalikan semua biaya, biaya harus dikelompokkan menjadi biaya terkendali dan biaya tidak terkendali. Ini akan memungkinkan manajer untuk lebih fokus pada pengendalian biaya yang termasuk tanggung jawab mereka.

4) Sistem Akuntansi Biaya

Setiap tingkatan manajemen dalam perusahaan merupakan pusat biaya yang akan dibebani oleh biaya yang terjadi di dalamnya, baik yang dapat

²¹ Mulyadi, "Akuntansi Biaya," Edisi 5. C (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2018).

dikendalikan maupun tidak. Seluruh biaya kemudian dikumpulkan sesuai dengan tingkat manajer, sehingga perlu adanya pengkodean biaya berdasarkan struktur organisasi.

5) Laporan Pertanggungjawaban.

Salah satu bagian penting dari akuntansi pertanggungjawaban adalah laporan pertanggungjawaban, yang diberikan kepada manajer yang bertanggung jawab. Laporan ini berisi data yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan manajer.

Selain itu, Mulyadi menyatakan bahwa ada beberapa persyaratan penting untuk pembentukan dan pengembangan akuntansi pertanggungjawaban, yaitu sebaga berikut :²²

- 1) Akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem yang membagi organisasi ke dalam beberapa bagian sesuai tanggung jawab masing-masing. Setiap kepala departemen diberi anggaran dan harus bertanggung jawab atas biaya serta kegiatan di unitnya. Inti dari konsep ini adalah bahwa biaya harus dikelompokkan berdasarkan apakah biaya tersebut dapat dikendalikan atau tidak dikendalikan oleh manajer. Artinya, seorang manajer hanya bertanggung jawab atas biaya yang memang berada di bawah kendalinya.
- 2) Titik awal dalam sistem akuntansi pertanggungjawaban berada pada bagian organisasi yang telah memiliki batasan wewenang yang jelas. Wewenang tersebut menjadi dasar dalam penetapan tanggung jawab atas biaya tertentu, yang kemudian disusun melalui pertimbangan dan kerja sama dalam bentuk anggaran.
- 3) Setiap anggaran harus menunjukkan dengan jelas biaya mana yang bisa dikendalikan oleh orang yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, daftar akun (bagan perkiraan) perlu disesuaikan agar pencatatan biaya dapat

²² Mulyadi. "Akuntansi Biaya," Edisi 5. C (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2018). Hal. 349.

dilakukan sesuai dengan biaya yang menjadi tanggung jawab dan wewenang masing-masing pihak.²³

Dari pendapat Mulyadi di atas, penulis menyimpulkan bahwa untuk menerapkan akuntansi pertanggungjawaban, struktur organisasi yang jelas, anggaran yang disusun oleh setiap pusat pertanggungjawaban, penggolongan biaya terkendali dan tidak terkendali, sistem akuntansi biaya yang tepat, dan laporan pertanggungjawaban yang membantu pengambilan keputusan. Selain itu, sistem ini harus didasarkan pada pembagian tanggung jawab manajemen, penetapan lingkup wewenang, dan anggaran yang secara tegas menunjukkan biaya yang dapat dikendalikan oleh masing-masing manajer.

d. Karakteristik Akuntansi Pertanggungjawaban

Menurut Mulyadi, akuntansi pertanggungjawaban memiliki empat karakteristik yaitu sebagai berikut:²⁴

- 1) Sistem akuntansi pertanggungjawaban menetapkan pusat pertanggungjawaban sebagai bagian dari organisasi. Setiap pusat pertanggungjawaban yang dibuat akan diberikan tanggung jawab kepada orang yang diberi wewenang untuk mengelolanya.
- 2) Menciptakan standar untuk mengevaluasi kinerja manajer yang bertanggung jawab atas bidang tugas tertentu. Setelah menentukan siapa yang bertanggung jawab, akuntansi pertanggungjawaban menetapkan biaya umum yang digunakan untuk membuat anggaran. Anggaran tersebut digunakan untuk menilai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- 3) Kinerja manajer diukur melalui perbandingan antara realisasi dan anggaran. Pelaksanaan anggaran mencerminkan penggunaan sumber daya oleh manajer untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Melalui perbandingan

²³ Mulyadi, "Akuntansi Biaya," Edisi 5. C (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2018).Hal. 350.

²⁴ Mulyadi, "Akuntansi Biaya," Edisi 5. C (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2018) Hal. 351.

biaya aktual dan biaya yang dianggarkan, dapat diketahui tingkat kinerja manajer pusat pertanggungjawaban.

- 4) Pemberian penghargaan atau hukuman kepada manajer dilakukan secara individual berdasarkan kebijakan manajemen puncak. Sistem ini dirancang untuk mendorong manajer dalam mengelola biaya agar sesuai dengan target anggaran. Evaluasi dilakukan berdasarkan analisis penyimpangan antara biaya aktual dan biaya yang dianggarkan, sehingga penghargaan atau sanksi diberikan sesuai kinerja yang dicapai.

Penulis mengambil kesimpulan bahwa akuntansi pertanggungjawaban memiliki empat ciri utama, berdasarkan pendapat Mulyadi tentang ciri-ciri akuntansi pertanggungjawaban di atas adanya pusat pertanggungjawaban dengan orang yang diberi wewenang, penetapan standar atau anggaran sebagai ukuran kinerja, pengukuran kinerja dengan membandingkan realisasi dan anggaran; dan memberikan penghargaan atau hukuman kepada manajer berdasarkan hasil evaluasi penyimpangan biaya.

e. Pusat-Pusat Pertanggungjawaban

1) Pusat Biaya (*Cost Center*)

Pusat biaya merupakan bagian dari pusat pertanggungjawaban dalam sistem pengendalian manajemen yang inputnya dinilai menggunakan satuan moneter, sedangkan outputnya tidak diukur dengan satuan moneter.²⁵

2) Pusat Pendapatan (*Revenue Center*)

Pusat pendapatan adalah pusat pertanggungjawaban yang hasil keluarannya dinilai dalam bentuk rupiah, sementara input yang digunakan tidak dikaitkan secara langsung dengan output yang dihasilkan.²⁶

²⁵ Murhaban and Adnan, "Sistem Pengendalian Manajemen". (Aceh: CV. Sefa Bumi Persada, 2020). Hal.70

²⁶ Murhaban and Adnan, "Sistem Pengendalian Manajemen". (Aceh: CV. Sefa Bumi Persada, 2020).72

3) Pusat Laba (*Profit Center*)

Suatu pusat pertanggungjawaban dikatakan sebagai pusat laba apabila kinerja keuangannya diukur berdasarkan laba yang diperoleh. Laba menjadi indikator penting karena mampu memberikan gambaran kinerja yang lebih menyeluruh sehingga manajer senior dapat menggunakan ukuran tersebut dibandingkan harus memakai berbagai indikator.²⁷

f. Pertanggungjawaban Menurut Pandangan Islam

Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk menunaikan setiap amanah, baik amanah dari-Nya maupun dari sesama, dan menyerahkannya kepada pihak yang berhak. Dalam menetapkan hukum, dilarang berbuat curang dan harus berlaku adil. Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat setiap ucapan serta perbuatan hamba-Nya. Ia Mengetahui siapa yang menjaga amanah dan siapa yang mengabaikannya, serta siapa yang berlaku adil atau zalim. Masing-masing akan menerima balasannya. Berikut dalil Al-Qur'an mengenai pertanggungjawaban.

1) Qs. An-Nisa'/4: 58.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨﴾

Terjemahannya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”²⁸

2) QS. As-Saffat/37: 22-24.

أَحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿٢٢﴾ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَنِيمِ ﴿٢٣﴾ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ ﴿٢٤﴾

²⁷ Murhaban and Adnan, "Sistem Pengendalian Manajemen". (Aceh: CV. Sefa Bumi Persada, 2020).75

²⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Juz 1-30 Edisi Baru* (Surabaya: Mekar Surabaya, 2019). An-Nisa : 4.

Terjemahannya:

(Lalu, diperintahkan kepada para malaikat,) “Kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan apa yang dahulu mereka sembah selain Allah. Lalu, tunjukkanlah kepada mereka jalan ke (neraka) Jahim. Tahanlah mereka (di tempat perhentian). Sesungguhnya mereka akan ditanya (tentang keyakinan dan perilaku mereka).”²⁹

Ayat tersebut diulang beberapa kali oleh beliau sebagai bentuk perenungan terhadap besarnya tanggung jawab yang akan dipertanggungjawabkan oleh seorang pemimpin di akhirat, terutama apabila melakukan tindakan kezaliman. Dalam riwayat lain, Umar bin Khatta juga menggambarkan beratnya amanah seorang pemimpin di akhirat melalui perkataannya yang terkenal: “Seandainya seekor keledai terperosok di kota Baghdad niscaya Umar akan dimintai pertanggungjawabannya, seraya ditanya: Mengapa tidak meratakan jalan untuknya?” Itulah dua dari ribuan contoh yang pernah dilukiskan para salafus sholih tentang tanggung jawab pemimpin di hadapan Allah kelak.

g. Hubungan Ayat di atas dengan Akuntansi Pertanggungjawaban

Dari ayat di atas menegaskan pentingnya amanah, keadilan, serta tanggung jawab seorang pemimpin. Allah memerintahkan agar setiap amanah disampaikan kepada yang berhak dan setiap keputusan dilakukan dengan adil. Ayat-ayat tersebut juga menggambarkan beratnya hisab kepemimpinan di akhirat, sebagaimana dicontohkan oleh Umar bin Khattab r.a. yang merasa dirinya akan dimintai pertanggungjawaban bahkan atas seekor keledai yang terjatuh. Ini menunjukkan bahwa setiap bentuk pengelolaan kewajiban dan wewenang harus dilaksanakan dengan penuh kejujuran dan kehati-hatian.

Dalam Akuntansi Pertanggungjawaban, prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan moral dan etis. Setiap penanggung jawab unit wajib mengelola anggaran, aset, serta kewenangan yang diberikan dengan jujur, transparan, dan sesuai aturan.

²⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Juz 1-30 Edisi Baru* (Surabaya: Mekar Surabaya, 2019). As-Saffat : 37.

Laporan yang disusun bukan hanya menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada organisasi, tetapi juga mencerminkan amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dengan demikian, ayat-ayat tersebut memberikan penguatan bahwa akuntansi pertanggungjawaban bukan sekedar prosedur administratif, tetapi juga bagian dari menjaga amanah dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya.

4. Konsep Sisa Hasil Usaha (SHU)

a. Pengertian dan perhitungan Sisa Hasil Usaha

Dalam bahasa Inggris, *surplus* adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku setelah dikurangi penyusutan serta seluruh biaya tahun buku tersebut (Pasal 31 UU No. 12 Tahun 1967).

Sisa hasil usaha ini adalah sebagai berikut antara lain:³⁰

- 1) Surplus yang berasal dari kegiatan usaha yang dilakukan untuk anggota.
- 2) Surplus yang diperoleh dari kegiatan usaha yang dilakukan untuk pihak ketiga.

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 Bab IX Pasal 45, jumlah SHU yang diterima setiap anggota berbeda karena dipengaruhi oleh transaksi yang dilakukan oleh anggota dan tingkat partisipasi modalnya terhadap pembentukan pendapatan koperasi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa ada korelasi positif antara tingkat transaksi anggota dan perolehan SHU: semakin besar kontribusi transaksi usaha dan modal anggota, semakin besar SHU yang diterima.³¹

Dari perspektif ekonomi manajemen, SHU dapat didefinisikan sebagai selisih antara total pendapatan (*Total Revenue*) dengan total biaya (*Total Cost*) dalam satu tahun buku, setelah dikurangi penyusutan dan biaya lainnya. Menurut Sitio dan Tamba, SHU dapat disimpulkan sebagai selisih antara seluruh biaya dalam satu periode akuntansi dengan pendapatan koperasi, yang berasal dari usaha dengan anggota dan pihak ketiga, dan dibagi secara proporsional berdasarkan

³⁰ Kartasapoetra dkk, "Koperasi Indonesia Yang Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945," Revisi (Jakarta: Bumi Aksara, 2001).

³¹ Sitio dan Tamba, "Koperasi : Teori Dan Praktik." (Jakarta: Erlangga, 2001). Hal:87.

partisipasi. Pulsa SHU yang diperoleh berkorelasi positif dengan kontribusi anggota.

Penulis berpendapat bahwa sisa hasil usaha adalah perbedaan antara pendapatan koperasi dan seluruh biaya tahun buku. Usaha dengan anggota dan pihak ketiga menghasilkan sisa hasil usaha, yang dibagi berdasarkan transaksi dan partisipasi modal masing-masing anggota. Sisa Hasil Usaha berkorelasi positif dengan kontribusi anggota.

Menurut Sitio dan Tamba, sisa hasil usaha koperasi berasal dari dua usaha ekonomi anggota, yaitu:³²

1) Sisa Hasil Usaha atas jasa Modal

Pembagian SHU atas jasa modal menunjukkan kedudukan anggota koperasi sebagai pemilik atau investor dalam koperasi. Anggota tetap memperoleh bagian atas modal atau simpanan yang dimilikinya selama koperasi menghasilkan Sisa Hasil Usaha pada tahun buku terbit.

2) Sisa Hasil Usaha atas Jasa Usaha

Pembagian ini menunjukkan bagaimana anggota koperasi berfungsi sebagai pemilik dan pengguna jasa.

b. Perhitungan Sisa Hasil Usaha

Setelah semua biaya dan kewajiban finansial lainnya dikurangi, pendapatan yang diperoleh koperasi disebut sisa hasil usaha (SHU). Sebelum didistribusikan, SHU dialokasikan terlebih dahulu untuk dana cadangan. Kemudian, sisa SHU didistribusikan kepada anggota sesuai dengan jasa atau kontribusi mereka masing-masing kepada koperasi. Sebagian lainnya digunakan untuk pendidikan perkoperasian dan kebutuhan operasional koperasi, yang diputuskan dalam RAT.³³

³² Sitio dan Tamba. "Koperasi : Teori Dan Praktik." (Jakarta: Erlangga, 2001). Hal:88.

³³ Sitio dan Tamba. "Koperasi : Teori Dan Praktik." (Jakarta: Erlangga, 2001).

Prinsip dasar koperasi menetapkan bahwa SHU dibagi berdasarkan jasa setiap anggota. Oleh karena itu, SHU dibagi menjadi SHU yang berasal dari kegiatan usaha dengan anggota dan SHU yang berasal dari kegiatan usaha dengan pihak non anggota:³⁴

- 1) Sisa Hasil Usaha yang berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota dibagi untuk:
 - a) Cadangan koperasi.
 - b) Anggota sebanding dengan jasa yang diberikannya.
 - c) Dana pengurus.
 - d) Dana pegawai/karyawan.
 - e) Dana pendidikan koperasi.
 - f) Dana sosial
 - g) Dana pembangunan daerah kerja
- 2) Sisa Hasil Usaha yang berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk bukan anggota dibagi untuk:
 - a) Cadangan koperasi.
 - b) Dana pengurus.
 - c) Dana pegawai/karyawan.
 - d) Dana pendidikan.
 - e) Dana sosial.
 - f) Dana pembangunan daerah kerja.

Menurut pasal 45 ayat 1 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, perhitungan akhir tahun yang menunjukkan pendapatan koperasi dan bagaimana pendapatan tersebut dialokasikan untuk biaya koperasi dapat dirumuskan sebagai berikut:³⁵

$$\text{SHU} = \text{Pendapatan} - (\text{Biaya} + \text{Penyusutan} + \text{Kewajiban Lain} + \text{Pajak})$$

³⁴ Widiyanti dan Sunindhia, “Koperasi Dan Perekonomian Indonesia” (Jakarta: Rineka Cipta, 1992). Hal:157.

³⁵ Partomo, dkk, “Ekonomi Skala Kecil Atau Menengah Dan Koperasi.” (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002). Hal. 83.

Rumus di atas dapat disederhanakan menjadi:

$$\text{SHU} = \text{TR (Total Revenue)} - \text{TC (Total Cost)}$$

Sisa Hasil Usaha merupakan keseluruhan pendapatan koperasi yang diperoleh dari berbagai kegiatan usaha setelah dikurangi biaya operasional dalam periode satu tahun buku yang sama. Besarnya SHU dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu volume usaha yang dicapai serta besarnya biaya operasional yang dikeluarkan koperasi..

Berdasarkan persamaan ($\text{SHU} = \text{TR} - \text{TC}$) tersebut, maka akan ada tiga kemungkinan yang terjadi, yaitu:

- 1) Kontribusi anggota terhadap pendapatan koperasi lebih besar daripada kebutuhan biaya riil koperasi. Dalam situasi seperti ini, selisih yang disebut SHU positif akan diperoleh. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan koperasi, dividen dikembalikan kepada anggota.
- 2) Jika jumlah pendapatan koperasi lebih kecil dibandingkan total biaya koperasi, maka akan muncul SHU negatif atau SHU minus. Keadaan ini menunjukkan bahwa kontribusi anggota belum mampu menutupi seluruh biaya operasional koperasi. Kekurangan tersebut biayanya ditutupi menggunakan dana cadangan yang berasal dari penyisihan SHU pada periode sebelumnya. Dana cadangan tersebut berfungsi untuk memperkuat modal sendiri dan menutup kerugian koperasi apabila diperlukan.
- 3) Apabila jumlah pendapatan koperasi sama dengan jumlah biaya yang dikeluarkan, maka kondisi tersebut disebut SHU nihil atau seimbang. Hal ini menandakan bahwa pendapatan dan pengeluaran koperasi berada pada posisi yang seimbang. Dalam kondisi tersebut, koperasi perlu meningkatkan kinerjanya agar mampu memperoleh SHU positif, salah satunya melalui peningkatan efisiensi kerja, baik dalam pengelolaan internal maupun dalam pemanfaatan sumber daya yang dimiliki.

Secara teoritis, SHU diperoleh dari selisih antara total pendapatan dan total biaya koperasi dalam satu periode buku. Dasar perhitungan tersebut juga diterapkan pada Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Pinrang. Dalam praktiknya, koperasi menggunakan software BMT untuk membantu proses pencatatan transaksi dan perhitungan SHU secara otomatis. Perhitungan SHU dalam aplikasi tersebut dilakukan berdasarkan pendapatan koperasi yang diperoleh selama satu periode, kemudian dikurangi dengan biaya operasional, penyusutan, kewajiban lain, dan komponen pengeluaran lainnya sebelum dilakukan pembagian SHU kepada anggota. Dengan demikian, penggunaan software BMT tidak mengubah dasar perhitungan SHU, melainkan membantu proses pengolahan data dan penyusunan laporan SHU agar lebih efektif dan transparan.

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sisa Hasil Usaha Koperasi

Menurut Iramani dan E. Kristijadi, jumlah anggota, volume usaha, dan jumlah simpanan sebagai modal sendiri dan utang sebagai modal asing adalah beberapa komponen yang mempengaruhi Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi.

Menurut Atmadji, SHU koperasi dipengaruhi oleh indikator keuangan seperti modal sendiri, modal luar, dan volume usaha. Selain itu, ada indikator non-keuangan yang memengaruhi perkembangan koperasi, seperti jumlah anggota, tenaga kerja yang terserap, dan unit koperasi.³⁶

Menurut Atmadji, faktor-faktor yang mempengaruhi sisa hasil usaha koperasi ditunjukkan oleh indikator keuangan koperasi, seperti modal sendiri, modal luar, volume usaha, dan sisa hasil usaha. Indikator non keuangan, seperti jumlah anggota, tenaga kerja yang terserap, dan unit koperasi, juga mempengaruhi perkembangan koperasi.³⁷

³⁶ Iramani dan E. Kristijadi, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sisa Hasil Usaha Koperasi Unit Desa Di Jawa Timur,” *Ventura* 1, No.2 (1997): 75.

³⁷ Atmadji, “Faktor-Faktor Yang Menentukan Besarnya Sisa Hasil Usaha Koperasi Dari Aspek Keuangan Dan Non-Keuangan Di Indonesia,” *Bisnis Dan Manajemen* 7, No. 2 (2007): 215.

Penulis mengambil kesimpulan dari pendapat ahli di atas bahwa variabel yang mempengaruhi sisa hasil usaha koperasi termasuk jumlah anggota, volume usaha, modal sendiri, dan modal luar, serta kondisi non-keuangan seperti tenaga kerja dan jumlah unit koperasi. Dengan peningkatan kapasitas usaha dan modal, sisa hasil usaha biasanya meningkat.

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berfokus pada bagaimana menggunakan akuntansi pertanggungjawaban dalam laporan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang. Dalam penelitian ini, penerapan akuntansi pertanggungjawaban dievaluasi berdasarkan beberapa metrik yang mengacu pada persyaratan penerapan akuntansi menurut Mulyadi; ini termasuk struktur organisasi, anggaran, pemisahan biaya, laporan pertanggungjawaban, dan keterlibatan dan transparansi anggota.

1. Struktur Organisasi (Pusat Pertanggungjawaban)

Struktur organisasi digunakan untuk menilai apakah koperasi telah memiliki pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas pada setiap unit kerja sebagai bentuk pusat pertanggungjawaban. Penilaian dilakukan berdasarkan adanya struktur organisasi yang jelas, pembagian tugas dan wewenang pada setiap unit kerja, serta adanya pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pelaporan keuangan koperasi.

2. Anggaran sebagai Alat Pengendalian

Anggaran digunakan untuk menilai apakah koperasi telah menyusun anggaran operasional sebagai alat perencanaan dan pengendalian kegiatan usaha. Penilaian dilakukan berdasarkan adanya penyusunan anggaran sebelum

periode berjalan, penggunaan anggaran sebagai pedoman kegiatan operasional, serta adanya evaluasi antara anggaran dan realisasi kegiatan koperasi.

3. Pemisahan Biaya Terkendali dan Tidak Terkendali

Indikator ini digunakan untuk menilai apakah koperasi telah melakukan penggolongan biaya berdasarkan tingkat pengendalian masing-masing unit kerja. Penilaian dilakukan berdasarkan adanya pemisahan biaya terkendali dan tidak terkendali, pengelompokan biaya sesuai tanggung jawab unit kerja, serta adanya kejelasan tanggung jawab terhadap biaya yang dapat dikendalikan.

4. Laporan Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban digunakan untuk menilai bagaimana koperasi menyusun dan menyampaikan laporan keuangan seta laporan SHU kepada anggota koperasi. Penilaian dilakukan berdasarkan adanya laporan keuangan dan laporan SHU secara berkala, penyampaian laporan melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT), serta keterbukaan informasi laporan yang mudah dipahami oleh anggota koperasi.

5. Partisipasi Anggota dan Transparansi

Indikator ini digunakan untuk menilai keterlibatan anggota dan keterbukaan koperasi dalam penyampaian informasi SHU. Penilaian dilakukan berdasarkan adanya akses anggota terhadap informasi SHU, kesempatan anggota memberikan tanggapan dalam RAT, serta keterbukaan koperasi dalam penyampaian laporan SHU kepada anggota.

Berdasarkan indikator-indikator di atas, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis bagaimana penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam laporan pembagian SHU dapat mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan koperasi kepada anggota.

D. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir penelitian ini diawali dengan teori akuntansi pertanggungjawaban sebagai landasan utama dalam menganalisis sistem

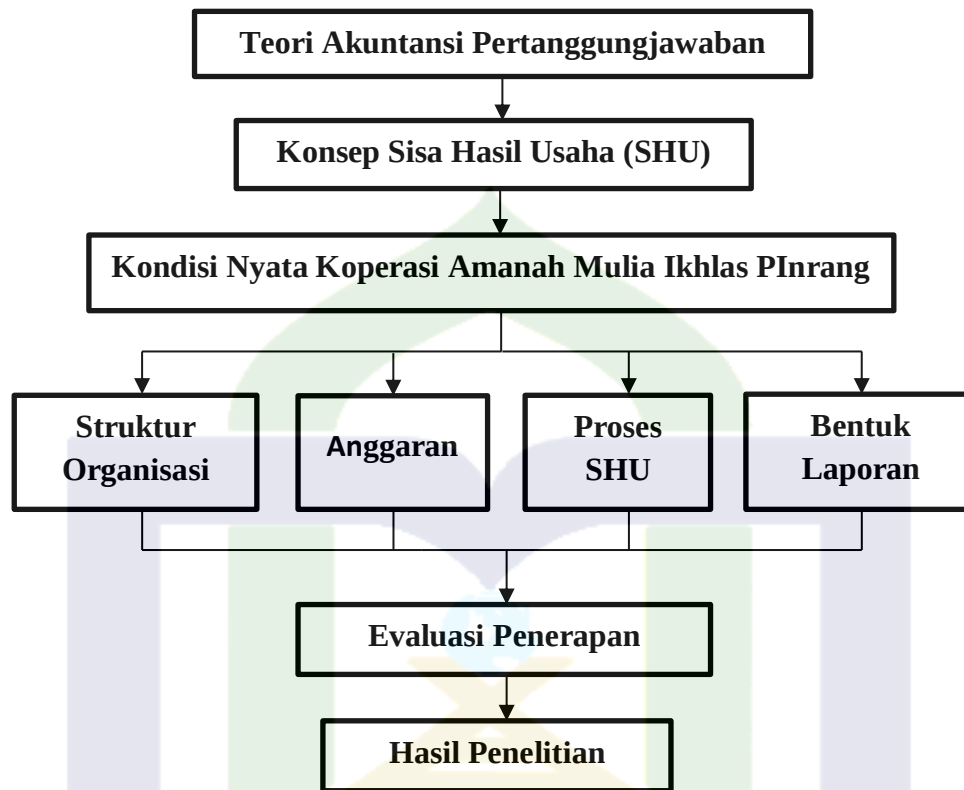
pengelolaan dan pelaporan keuangan pada koperasi. Akuntansi pertanggungjawaban menekankan pentingnya pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas dalam organisasi sebagai dasar pengendalian dan evaluasi kinerja pada setiap bagian.

Selanjutnya, teori tersebut dikaitkan dengan konsep Sisa Hasil Usaha (SHU) dalam koperasi. SHU merupakan hasil usaha koperasi dalam satu periode buku yang dihitung berdasarkan pendapatan dan biaya koperasi, kemudian dibagikan kepada anggota sesuai kontribusinya. Dalam koperasi, pembagian SHU tidak hanya mencerminkan hasil usaha koperasi, tetapi juga menjadi bentuk pertanggungjawaban pengurus kepada anggota sebagai pemilik koperasi.

Penelitian ini mengkaji penerapan akuntansi pertanggungjawaban pada penyusunan dan pembagian SHU di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang melalui beberapa aspek, yaitu struktur organisasi dan pembagian tanggung jawab, penyusunan anggaran sebagai alat pengendalian, pemisahan biaya terkendali dan tidak terkendali, mekanisme penyusunan laporan keuangan dan SHU, laporan pertanggungjawaban, serta transparansi dan partisipasi anggota dalam pelaporan SHU.

Aspek-aspek tersebut dianalisis untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam penyusunan dan pembagian SHU, kendala yang dihadapi koperasi dalam penerapannya, serta upaya yang dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan SHU kepada anggota koperasi.

Hasil dari keseluruhan proses tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai penerapan akuntansi pertanggungjawaban pada penyusunan dan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang.



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian lapangan dilakukan karena data diperoleh secara langsung dari objek penelitian, yaitu Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang. Pendekatan ini digunakan karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam pelaporan Sisa Hasil Usaha (SHU) berdasarkan perspektif pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses tersebut.

Menurut Creswell, penelitian kualitatif merupakan pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna suatu fenomena sosial melalui pandangan partisipan dalam konteks alamiah. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual proses penyusunan, pelaporan, dan pembagian SHU tanpa melakukan pengujian hipotesis atau manipulasi variabel.³⁸

Melalui analisis interpretatif terhadap data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai sejauh mana penerapan akuntansi pertanggungjawaban mendukung prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pembagian SHU pada Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kantor Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Pinrang, Jalan Veteran, Pacongang, Kecamatan Paletteang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Lokasi ini dipilih karena koperasi tersebut aktif

³⁸ J. W. Creswell, “*Research Design: Pendekatan, Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed.*” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014).

dalam kegiatan simpan pinjam serta secara rutin menyusun laporan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU), sehingga relevan dengan fokus penelitian tentang penerapan akuntansi pertanggungjawaban.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama $\pm$ 2 bulan. Rentang waktu ini mencakup kegiatan wawancara mendalam, pengumpulan dokumen, observasi lanjutan, serta proses verifikasi data.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam penyusunan dan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang, yang meliputi pelaksanaan sistem pertanggungjawaban dalam struktur organisasi, penyusunan anggaran, proses perhitungan, dan pelaporan SHU. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji kendala yang dihadapi dalam penerapannya serta upaya yang dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan pembagian SHU kepada anggota koperasi.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data merupakan pihak yang memberikan informasi utama terkait fokus penelitian. Adapun sumber data dari penelitian ini yaitu

1. Data Primer

Data primer, menurut Sugiyono, adalah sumber utama penelitian ini, dan diperoleh langsung dari responden melalui observasi dan wawancara. Manajer koperasi dan anggota koperasi sebagai penerima hasil usaha adalah sumber data primer.³⁹

³⁹ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D." (Bandung: Alfabeta, 2016).

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui perantara instansi-instansi pemerintah yang terkait erat dengan penelitian ini atau sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data yang biasanya melalui perantara lewat orang lain atau lewat dokumen seperti buku, artikel, laporan-laporan, maupun arsip-arsip resmi serta literatur lainnya yang relevan dalam melengkapi data primer penelitian.⁴⁰

Data sekunder diperoleh melalui laporan pembagian Sisa Hasil Usaha, laporan keuangan koperasi, AD/ART koperasi, notulen rapat anggota, dan buku, jurnal, artikel, dan literatur terkait akuntansi pertanggungjawaban serta koperasi.

E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah penelitian:

1. Observasi

Langkah awal dari teknik pengumpulan data yakni observasi. observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat, serta dilakukan secara sengaja.⁴¹ Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi nyata koperasi, aktivitas pengurus, serta pola penyusunan dan penyampaian laporan Sisa Hasil Usaha.

2. Wawancara

Teknik selanjutnya yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan

⁴⁰ Sugiyono. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D." (Bandung: Alfabeta, 2016).

⁴¹ Abdussamad, "Metode Penelitian Kualitatif". (Makassar: Syakir Media Press, 2021). Hal.147.

permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit.⁴²

Dalam penelitian ini, wawancara mendalam dilakukan kepada informan yang terlibat dalam proses penyusunan dan pembagian Sisa Hasil Usaha, yaitu manajer koperasi serta anggota koperasi. Informan tersebut dipilih untuk memperoleh informasi mengenai penerapan akuntansi pertanggungjawaban serta transparansi pembagian SHU.

3. Dokumentasi

Langkah ketiga yang dilakukan penulis dalam teknik pengumpulan data adalah dokumentasi. Dokumentasi yaitu ditunjukkan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, dan data-data penelitian yang relevan. Peneliti menggunakan media dokumentasi untuk mendapatkan data langsung dari tempat penelitian berupa jurnal, buku, catatan, dan data penelitian yang relevan.⁴³

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data diperlukan untuk memastikan bahwa penelitian yang dilakukan benar-benar memenuhi standar ilmiah dan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan kondisi nyata lapangan. Dalam penelitian kualitatif, pengujian keabsahan data mencakup beberapa bentuk pemeriksaan, yaitu *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.⁴⁴ Data dikatakan sah apabila informasi yang dikumpulkan peneliti tidak berbeda dengan keadaan sebenarnya pada objek penelitian sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan uji kredibilitas.

⁴²Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D." (Bandung: Alfabeta, 2018).

⁴³Sudaryono, "Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan *Mix Method*." (Depok: PT. Raja Grafindo Persada., 2019).

⁴⁴Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (*Mixed Methods*)". (Bandung: Alfabeta., 2011).

Uji kredibilitas atau uji kepercayaan terhadap data berfungsi untuk menilai kebenaran temuan penelitian kualitatif. Konsep ini sepadan dengan uji validitas internal pada penelitian kuantitatif. Berbagai teknik digunakan untuk memastikan kredibilitas, seperti perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan selama penelitian, serta penggunaan triangulasi.

Menurut William Wiersma, triangulasi merupakan proses pengecekan data melalui berbagai sumber, metode, dan waktu yang berbeda.⁴⁵ Dalam penelitian ini uji keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber data. Triangulasi sumber dilakukan dengan memverifikasi informasi menggunakan beragam jenis data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi, serta membandingkan keterangan dari lebih dari satu informan yang memiliki perspektif terkait.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁴⁶

Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan cara mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi suatu yang dikelola, menyintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Menurut Miles dan Huberman, ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam analisis data kualitatif yaitu:⁴⁷

1. Reduksi Data

Reduksi data merujuk pada pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan performatian “data mentah” yang terjadi

⁴⁵ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (*Mixed Methods*)". (Bandung: Alfabeta., 2011).

⁴⁶ Dewi Sadiah, "Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif," (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015).

⁴⁷ M.B & Huberman A.M. Miles, "Analisis Data Kualitatif. Terjemahan Oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992". (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1984).

dalam catatan-catatan lapangan yang tertulis. Sebagaimana kita ketahui, reduksi data terjadi secara berkelanjutan, melalui kehidupan suatu proyek yang diorientasikan secara kualitatif. Faktanya, bahkan “sebelum” data secara aktual dikumpulkan.⁴⁸ Atau lebih sederhananya lagi, reduksi data adalah proses memilih, menyederhanakan dan memfokuskan data penting yang relevan dengan fokus penelitian.

2. Penyajian Data

Penyajian data yaitu menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data yang diperoleh dari lapangan terkait dengan seluruh permasalahan penelitian kemudian dipilih sesuai dengan yang dibutuhkan, lalu dikelompokkan kemudian diberikan batasan masalah. Dari penyajian tersebut, maka diharapkan dapat memberikan kejelasan data yang detail dan substansif dengan data pendukung.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan data verifikasi kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan “makna” sesuatu mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausal, dan proporsi-proporsi. Peneliti yang kompeten dapat menangani kesimpulan-kesimpulan ini secara jelas, memelihara kejujuran, kecurigaan dan lainnya. Penarikan kesimpulan hanya sebagian dari suatu proses analisis data.⁴⁹

⁴⁸ Emzir, "Analisis Data: Metode Penelitian Kualitatif" (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010). H.129.

⁴⁹ Sumandi Suryabrata, "Metodologi Penelitian," (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010). Hal.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Pinrang

Koperasi Amanah Mulia Ikhlas secara resmi dibentuk dan berkedudukan di Kabupaten Pinrang sejak 03 November 2016, melalui proses musyawarah yang dituangkan dalam rapat pembentukan awal berdasarkan surat kuasa di bawah tangan. Pendirian Koperasi ini dilatarbelakangi oleh inisiatif kolektif para kader DPD Wahdah Islamiyah Pinrang bersama para pendidik Sekolah Islam Terpadu Al-Ikhlas, yang disatukan dalam komitmen untuk membangun sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam serta berorientasi pada keberlanjutan dan kemaslahatan bersama.

Sebagai bagian dari proses legalisasi Koperasi Amanah Mulia Ikhlas kemudian didaftarkan dan disahkan oleh Notaris Yusmiati Yusuf, SH., M.Kn., melalui Akta Nomor 07 tanggal 06 Januari 2017. Pengesahan ini juga tercatat dalam Daftar Umum Koperasi dengan Nomor 137/Kep/M.KUKM/2017, sehingga semakin mempertegas status hukum koperasi dalam menjalankan seluruh kegiatan operasionalnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Dari aspek kepatuhan hukum, kegiatan operasional Koperasi Amanah Mulia Ikhlas telah memperoleh legitimasi resmi dari Pemerintah Republik Indonesia melalui penerbitan Nomor Induk Koperasi (NIK) 7315041020014 oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Penerbitan NIK tersebut menegaskan kedudukan Koperasi sebagai badan usaha yang sah dan beroperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, untuk mendukung legalitas kegiatan usaha, Koperasi Amanah Mulia Ikhlas juga terdaftar dalam sistem perizinan berusaha dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 2511220014709 yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal. Kepemilikan NIB ini memperkuat status koperasi sebagai entitas usaha yang

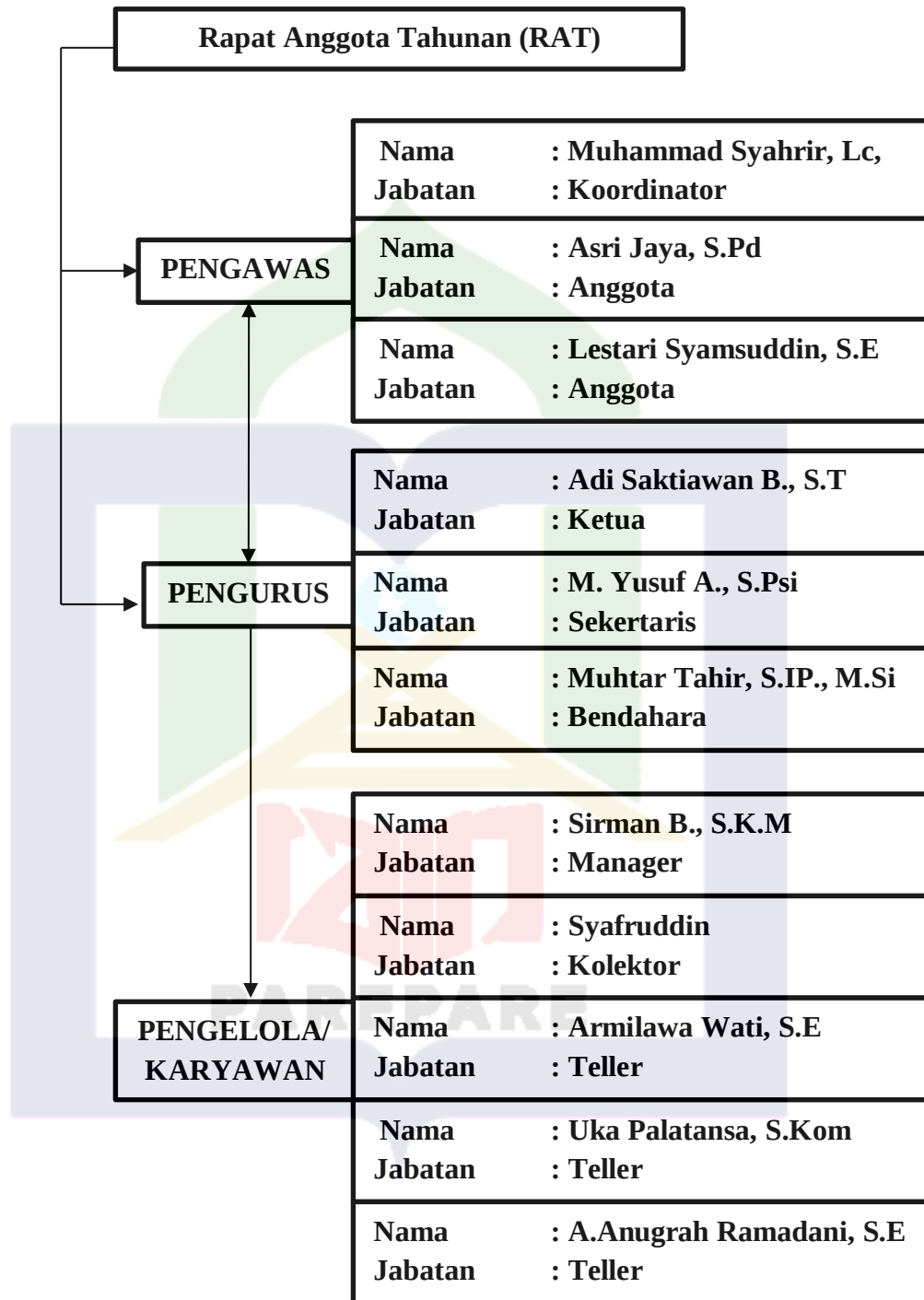
memiliki dasar hukum yang jelas dalam menjalankan aktivitas operasionalnya secara profesional, tertib administrasi, dan berlandaskan regulasi.

Koperasi Amanah Mulia Ikhlas merupakan lembaga ekonomi berbasis syariah yang tumbuh dari kolaborasi para anggotanya, sebagai wujud nyata dari semangat kebersamaan dan nilai-nilai muamalah yang sesuai syariat. Nilai gotong royong ini tercermin dalam setiap proses penetapan kebijakan, di mana arah dan keputusan koperasi ditentukan secara demokratis melalui musyawarah dalam rapat anggota.

Dalam upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan anggota, pengurus senantiasa berkomitmen menjalankan amanah dengan dedikasi tinggi dan penuh tanggung jawab. Prinsip-prinsip manajemen yang profesional diimplementasikan secara konsisten, disertai pengoptimalan seluruh potensi usaha yang telah dimiliki. Melalui langkah tersebut, diharapkan produktivitas serta profitabilitas unit usaha dapat meningkatkan dan memberikan nilai manfaat yang lebih besar bagi anggota.

Struktur organisasi merupakan salah satu aspek penting dalam suatu lembaga, termasuk koperasi, karena menunjukkan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam menjalankan kegiatan operasional. Berdasarkan hasil penelitian, struktur organisasi pada Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang terdiri atas beberapa unsur yang saling mendukung pengelolaan koperasi, yaitu Rapat Anggota Tahunan (RAT), pengawas, pengurus dan pengelola.

B. Struktur Organisasi



Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Pinrang.

C. Hasil Penelitian

1. Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban dalam Laporan Pembagian Sisa Hasil Usaha di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang

a. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan salah satu unsur penting dalam menjalankan kegiatan operasional koperasi, karena berkaitan dengan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab antar bagian. Dalam konteks koperasi, struktur organisasi tidak hanya menunjukkan susunan jabatan, tetapi juga menjadi dasar dalam pembentukan pusat-pusat pertanggungjawaban serta sistem evaluasi kinerja pada masing-masing bagian.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan manajer koperasi, Koperasi Amanah Mulia Ikhlas memiliki struktur organisasi yang tersusun secara formal, yang terdiri atas Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, pengurus, pengawas, serta pengelola. Pada tingkat pengelola terdapat pembagian tugas yang lebih rinci, seperti manajer, kolektor, administrasi, dan teller. Pembagian struktur tersebut dilakukan untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian dalam kegiatan operasional koperasi serta pengelolaan laporan keuangan dan SHU.

Pengurus bertanggung jawab dalam pengambilan kebijakan dan pengelolaan koperasi secara umum, sedangkan pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap jalannya kegiatan koperasi dan laporan keuangan. Pada bagian pengelola, manajer bertanggung jawab terhadap operasional koperasi dan pengawasan administrasi, administrasi bertugas melakukan pencatatan dan pengarsipan data koperasi, teller bertanggung jawab dalam pelayanan transaksi anggota, sedangkan kolektor bertugas melakukan penagihan dan monitoring pembayaran anggota koperasi.

Hal ini sebagaimana hasil wawancara yang disampaikan oleh pak Sirman. B, selaku Manajer Koperasi Amanah Mulia Ikhlas:

“Struktur di koperasi kami itu, di puncaknya itu di RAT, semua keputusan ada di RAT, di bawah RAT ada pengurus yang tanggung jawab sama kebijakan, setelah pengurus ada pengawas yang awasi kegiatan-kegiatan koperasi dan laporan keuangan, setelah pengawas koperasi ada pengelola, nah pada pengelola terbagilah manajer yang tanggung jawab terhadap operasional koperasi, terus administrasi mencatat dan arsip data koperasi, ada teller yang bertugas melayani transaksi nasabah kemudian kolektor yang tuasnya itu ya penagihan dan monitoring pembayaran.”⁵⁰

Dalam kaitannya dengan Sisa Hasil Usaha (SHU), Manajer juga menjelaskan bahwa seluruh bagian dalam koperasi memiliki kontribusi terhadap perolehan keuntungan, yaitu setiap bagian memiliki peran dalam mengembangkan usaha koperasi guna meningkatkan SHU yang diperoleh.

Penerapan akuntansi pertanggungjawaban sebenarnya telah dilakukan, tetapi belum ditemukan adanya pembentukan pusat-pusat pertanggungjawaban yang jelas pada masing-masing bagian. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Manajer:

“Dulu pernah ada, sekarang sudah tidak karena SDM di sini tidak terlalu banyak jadi kami tidak terlalu menekankan hal yang seperti itu, jadi mengenai target tidak ada, artinya kita bekerja sesuai porsi masing-masing, kolektor kerjanya bagaimana, manajer kerjanya bagaimana seperti memilah siapa-siapa pembiaya yang bisa diproses, teller tugasnya untuk melayani anggota koperasi.”⁵¹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pembagian tugas dalam koperasi memang telah ada, namun belum disertai dengan penetapan target atau indikator kinerja yang spesifik pada masing-masing bagian. Selain itu, aspek evaluasi kinerja juga belum dilakukan secara terstruktur. Berdasarkan

⁵⁰ Sirman. B, Manajer, wawancara di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang. 15 April 2026

⁵¹ Sirman. B, Manajer, wawancara di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang. 15 April 2026

hasil wawancara, evaluasi terhadap pelaksanaan tugas lebih berfokus pada peran Manajer tanpa adanya sistem penilaian yang terukur.

“Kalau untuk evaluasi tugas masing-masing itu sebenarnya yang berperan penting di koperasi itu cuman pengelola, karena pengurus sebenarnya tidak terlalu terlibat, kecuali pada saat ada kebijakan-kebijakan penting, kalau mengenai evaluasi-evaluasi untuk tugas di bawah manajer, itu semua ada di manajer bagaimana supaya bisa ditingkatkan kinerja teman-teman yang lain tidak ada indikator-indikator tertentu.”⁵²

Dalam pelaksanaannya, penyusunan laporan keuangan dan laporan SHU lebih banyak dilakukan oleh pihak pengelola koperasi, khususnya bagian administrasi dan manajer melalui sistem aplikasi koperasi yang digunakan. Bagian administrasi bertugas melakukan pencatatan dan penginputan data transaksi ke dalam aplikasi, sedangkan manajer bertanggung jawab melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap laporan yang disusun sebelum disampaikan kepada pengurus koperasi dan anggota koperasi melalui RAT.

Meskipun demikian, pembagian tugas tersebut belum sepenuhnya disertai dengan sistem pertanggungjawaban yang terstruktur dan indikator kinerja yang jelas pada masing-masing bagian. Hal ini terlihat dari pelaksanaan tugas yang masih bersifat saling membantu antarbagian dalam kegiatan operasional koperasi.

“Setiap bagian ada tugasnya masing-masing, tapi tetap saling bantu kalau ada kegiatan.”⁵³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa struktur organisasi koperasi telah terbentuk secara formal dan pembagian tugas telah berjalan, termasuk dalam penyusunan laporan keuangan dan SHU. Namun,

⁵² Sirman. B, Manajer, wawancara di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang. 15 April 2026

⁵³ Sirman. B, Manajer, wawancara di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang. 15 April 2026

dalam perspektif akuntansi pertanggungjawaban, struktur tersebut belum sepenuhnya didukung oleh pembentukan pusat pertanggungjawaban yang jelas serta sistem evaluasi kinerja yang terukur. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi pertanggungjawaban pada koperasi belum berjalan secara optimal

b. Anggaran

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Koperasi Amanah Mulia Ikhlas menyusun anggaran operasional sebagai pedoman dalam pengelolaan kegiatan usaha dan keuangan koperasi. Penyusunan anggaran dilakukan berdasarkan hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan disesuaikan dengan kebutuhan operasional koperasi. Anggaran tersebut digunakan sebagai acuan dalam menjalankan kegiatan serta membantu pengendalian penggunaan dana agar tetap sesuai dengan kebutuhan dan tanggung jawab masing-masing bagian.

Berdasarkan hasil wawancara, penyusunan anggaran tahunan dilakukan oleh pengurus koperasi. Setelah pelaksanaan RAT, pengurus kembali menyusun rencana kegiatan untuk periode berikutnya sesuai dengan kebutuhan koperasi.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Bapak Sirman B., selaku Manajer Koperasi Amanah Mulia Ikhlas:

“Kalau anggaran tahunan sebenarnya yang susun adalah pengurus, bukan dari pengelola. Karena sebenarnya anggaran tahunan kami tidak ada sedetail, kita cuma berdasarkan laporan RAT, setelah RAT itu kita susun lagi rencananya ke depan bagaimana.”⁵⁴

⁵⁴ Sirman. B, Manajer, wawancara di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang. 15 April 2026

Beliau juga menjelaskan bahwa:

“Jadi, kita jalani saja sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawab masing-masing di sini dan apa yang menjadi kebutuhan di kantor ini.”⁵⁵

Selain sebagai alat perencanaan, anggaran juga digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan operasional koperasi. Hasil penyusunan rencana setelah Rapat Anggota Tahunan (RAT) dijadikan sebagai acuan dalam menjalankan kegiatan koperasi serta menyesuaikannya dengan kebutuhan yang ada di kantor.

“Iya, biasanya hasil penyusunan rencana setelah RAT itulah yang kemudian dijadikan pegangan untuk kedepannya. Bagaimana kita jalankan kegiatan koperasi lalu kita sesuaikan dengan kebutuhan yang ada di kantor.”⁵⁶

Dalam pelaksanaannya, koperasi juga melakukan evaluasi terhadap anggaran atau rencana kegiatan yang telah disusun. Evaluasi tersebut dilakukan dengan melihat kembali pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan untuk mengetahui hal-hal yang masih perlu diperbaiki maupun disesuaikan pada periode berikutnya.

“Biasanya kalau sudah berjalan nanti dilihat lagi bagaimana pelaksanaannya, apa yang masih perlu diperbaiki atau disesuaikan lagi untuk kegiatan berikutnya.”⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa Koperasi Amanah Mulia Ikhlas telah menerapkan anggaran sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan pengendalian kegiatan operasional koperasi. Selain digunakan untuk membantu perencanaan kegiatan, anggaran juga dievaluasi

⁵⁵ Sirman. B, Manajer, *wawancara* di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang. 15 April 2026

⁵⁶ Sirman. B, Manajer, *wawancara* di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang. 15 April 2026

⁵⁷ Sirman. B, Manajer, *wawancara* di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang. 15 April 2026

secara berkala agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan koperasi.

c. Penggolongan Biaya (Biaya Terkendali dan Tidak Terkendali)

Koperasi Amanah Mulia Ikhlas melakukan pencatatan biaya berdasarkan kebutuhan operasional koperasi. Biaya yang dikeluarkan terdiri atas biaya rutin dan biaya yang bersifat tidak tetap. Biaya rutin meliputi gaji karyawan dan pembayaran listrik setiap bulan, sedangkan biaya lainnya disesuaikan dengan kebutuhan operasional yang muncul selama kegiatan koperasi berlangsung.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Bapak Sirman B., selaku Manajer Koperasi Amanah Mulia Ikhlas:

“Biaya-biaya sebenarnya di sini tidak ditentukan, tergantung, jadi apa-apa saja kebutuhan, tapi memang ada beban-beban rutin tiap bulan seperti gaji karyawan, bayar lampu tiap bulan itu ada, kecuali beban-beban yang tidak terduga itu kan semuanya secara langsung, tidak memiliki ketentuan.”⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa koperasi telah melakukan pencatatan terhadap biaya-biaya operasional yang dikeluarkan dalam kegiatan usaha koperasi. Namun, pengelompokan biaya antara biaya terkendali dan tidak terkendali belum dilakukan secara khusus. Pengeluaran biaya masih disesuaikan dengan kebutuhan operasional yang terjadi selama periode berjalan.

d. Sistem Akuntansi Biaya

Sistem akuntansi biaya pada Koperasi Amanah Mulia Ikhlas digunakan untuk mencatat seluruh transaksi dan biaya yang terjadi dalam kegiatan operasional koperasi. Berdasarkan hasil wawancara, pencatatan biaya dilakukan menggunakan aplikasi yang digunakan dalam pengelolaan

⁵⁸ Sirman. B, Manajer, wawancara di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang. 15 April 2026

keuangan koperasi. Melalui aplikasi tersebut, seluruh transaksi yang terjadi dapat dicatat dan disimpan dalam sistem.

Bapak Sirman B. selaku Manajer Koperasi Amanah Mulia Ikhlas menyampaikan bahwa:

“Seluruh pencatatan dilakukan melalui aplikasi, sehingga laporan keuangan dapat langsung diketahui melalui proses ekstraksi data dalam sistem. Dari aplikasi tersebut dapat terlihat jumlah beban, keuntungan, serta pembagian SHU sesuai dengan porsi modal masing-masing anggota.”⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa seluruh transaksi yang berkaitan dengan kegiatan operasional koperasi dicatat melalui aplikasi. Data yang tersimpan dalam aplikasi digunakan sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan dan perhitungan SHU anggota.

Selain digunakan untuk pencatatan transaksi, aplikasi juga memuat informasi mengenai biaya dan beban yang dikeluarkan koperasi selama menjalankan kegiatan usahanya. Melalui sistem tersebut, pengelola dapat mengetahui jumlah pengeluaran yang terjadi pada setiap periode.

Terkait biaya operasional koperasi, Bapak Sirman B. menjelaskan bahwa:

“Kalau biaya-biaya yang keluar tetap dicatat semua dalam sistem. Ada biaya yang memang rutin setiap bulan seperti gaji karyawan dan pembayaran listrik. Tetapi untuk biaya lain yang sifatnya tidak terduga, dikeluarkan sesuai kebutuhan operasional yang muncul saat itu.”⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, biaya yang dikeluarkan koperasi terdiri atas biaya rutin dan biaya yang dikeluarkan sesuai kebutuhan operasional. Biaya rutin yang disebutkan meliputi gaji karyawan dan

⁵⁹ Sirman. B, Manajer, *wawancara* di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang. 15 April 2026

⁶⁰ Sirman. B, Manajer, *wawancara* di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang. 15 April 2026

pembayaran listrik yang dikeluarkan setiap bulan. Sementara itu, biaya lainnya dikeluarkan sesuai kebutuhan yang muncul dalam kegiatan operasional koperasi.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa seluruh biaya yang terjadi dicatat dalam sistem aplikasi yang digunakan oleh koperasi. Data biaya tersebut menjadi bagian dari informasi keuangan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan perhitungan SHU pada akhir periode.

e. Laporan Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban merupakan bentuk penyampaian informasi mengenai pengelolaan koperasi kepada anggota sebagai pemilik koperasi. Pada Koperasi Amanah Mulia Ikhlas, laporan pertanggungjawaban disampaikan melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang dilaksanakan setiap tahun.

Berdasarkan hasil wawancara, dalam RAT pengurus koperasi menyampaikan laporan keuangan dan laporan SHU kepada anggota sebagai bentuk pertanggungjawaban atas hasil pengelolaan koperasi selama satu periode buku.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Bapak Sirman B., selaku Manajer Koperasi Amanah Mulia Ikhlas:

“Jadi, pada saat rapat anggota kami umumkan bahwa keuntungan untuk tahun buku berjalan itu sekian, jadi nanti jika masing-masing mau cek shu silahkan ke kantor, karena di 31 Desember itu kan keuntungan sudah jelas karena sudah dikurangi semua beban, jadi di 31 Desember pada saat tutup buku itu kan sudah di fix kan, jadi setelah itu langsung kita proses di aplikasi dan bagi ke rekening masing-masing, satu klik saja sudah langsung, yang diumumkan di rat itu total SHU-nya.”⁶¹

⁶¹ Sirman. B, Manajer, wawancara di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang. 15 April 2026

Besaran dan persentase pembagian SHU Tahun Buku 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Persentase Pembagian SHU Tahun Buku 2025

Penerima SHU	Persentase Pembagian	Nominal
Anggota KAMI	57%	Rp. 693.424.668
Dana Sosial, Pendidikan & Dakwah	25%	Rp.304.133.627
Dana Pembinaan	2.50%	Rp. 30.413.363
Pengawas	4%	Rp. 48.661.380
Pengurus	9%	Rp. 109.488.106
Pengelola	2.50%	Rp. 30.413.363

Sumber: Laporan Pengurus Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, pembagian SHU Tahun Buku 2025 dialokasikan kepada anggota koperasi, dana sosial, pendidikan dan dakwah, dana pembinaan, pengawas, pengurus, serta pengelola sesuai persentase yang telah ditetapkan oleh koperasi.

Selain penyampaian laporan melalui RAT, anggota koperasi juga diberikan kesempatan untuk mengetahui jumlah SHU yang diterima serta memberikan tanggapan terhadap laporan yang disampaikan. Anggota yang ingin mengetahui rincian SHU dapat langsung melakukan pengecekan ke kantor koperasi.

“Jadi, kalau mau tau shunya berapa silahkan ke kantor untuk cek rekening masing-masing.”⁶²

Dengan demikian, pembagian SHU tidak hanya berfokus pada anggota, tetapi juga mencerminkan adanya distribusi tanggung jawab dan kontribusi dari setiap unsur dalam koperasi.

⁶² Sirman. B, Manajer, wawancara di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang. 15 April 2026

“Setiap tahun laporan SHU disampaikan pada saat rapat anggota tahunan dan anggota diberikan kesempatan untuk bertanya.”⁶³

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota koperasi, penyampaian laporan SHU melalui RAT dinilai telah memberikan keterbukaan informasi kepada anggota koperasi. Sebagian anggota menyatakan bahwa laporan SHU telah disampaikan secara transparan dan dapat dipahami dengan baik.

“Laporan SHU disampaikan setiap tahun di saat Rapat Anggota Tahunan. Transparan sekali, ada perhitungannya.”⁶⁴

“Iya transparan, karena di saat Rapat Anggota tahunan itu ditampilkan semuanya.”⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa koperasi telah melaksanakan laporan pertanggungjawaban kepada anggota melalui penyampaian laporan keuangan dan laporan SHU dalam RAT. Selain itu, anggota juga diberikan kesempatan untuk mengetahui dan memberikan tanggapan terhadap laporan yang disampaikan sebagai bentuk keterbukaan informasi dalam pengelolaan koperasi.

2. Upaya dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Pembagian Sisa hasil Usaha di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan, Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang telah melakukan beberapa upaya dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) kepada anggota koperasi. Upaya tersebut dapat dilihat melalui penyampaian laporan SHU dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT),

⁶³ Sirman. B, Manajer, wawancara di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang. 15 April 2026

⁶⁴ Anugrah Ramadani, Teller/Anggota Koperasi, wawancara di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang. 17 April 2026

⁶⁵ Hartati, Anggota Koperasi, wawancara di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang. 17 April 2026

penggunaan aplikasi dalam proses pencatatan dan pembagian SHU, pemberian kesempatan kepada anggota untuk mengetahui jumlah SHU yang diterima, serta pemberian ruang kepada anggota untuk bertanya dan memberikan tanggapan terhadap laporan yang disampaikan.

Salah satu upaya yang dilakukan koperasi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan pembagian SHU adalah menyampaikan laporan keuangan dan laporan SHU melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT). RAT menjadi forum bagi pengurus untuk menyampaikan hasil pengelolaan koperasi selama satu periode buku kepada anggota. Dalam forum tersebut, anggota memperoleh informasi mengenai keuntungan koperasi dan laporan pembagian SHU.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Bapak Sirman B., selaku Manajer Koperasi Amanah Mulia Ikhlas:

“Jadi, pada saat rapat anggota kami umumkan bahwa keuntungan untuk tahun buku berjalan itu sekian, jadi nanti jika masing-masing mau cek SHU silahkan ke kantor, karena di 31 Desember itu kan keuntungan sudah jelas karena sudah dikurangi semua beban, jadi di 31 Desember pada saat tutup buku itu kan sudah di-fix-kan, jadi setelah itu langsung kita proses di aplikasi dan bagi ke rekening masing-masing, satu klik saja sudah langsung, yang diumumkan di RAT itu total SHU-nya.”⁶⁶

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa koperasi menyampaikan informasi mengenai keuntungan koperasi dalam RAT. Setelah proses tutup buku dilakukan, SHU diproses melalui aplikasi dan dibagikan ke rekening masing-masing anggota. Informasi yang diumumkan dalam RAT adalah jumlah total SHU, sedangkan anggota yang ingin mengetahui rincian SHU masing-masing dapat melakukan pengecekan langsung ke kantor koperasi.

⁶⁶ Sirman. B, Manajer, wawancara di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang. 15 April 2026

Selain menyampaikan laporan melalui RAT, koperasi juga memberikan kesempatan kepada anggota untuk mengetahui jumlah SHU yang diterima. Anggota yang ingin mengetahui rincian SHU dapat datang langsung ke kantor koperasi untuk mengecek rekening masing-masing. Hal tersebut disampaikan oleh manajer koperasi sebagai berikut:

“Jadi, kalau mau tau SHU-nya berapa silahkan ke kantor untuk cek rekening masing-masing.”⁶⁷

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa koperasi memberikan akses kepada anggota untuk mengetahui jumlah SHU yang diterima secara langsung. Hal ini menjadi salah satu bentuk keterbukaan informasi koperasi kepada anggota terkait hak anggota dalam pembagian SHU.

Hasil wawancara dengan anggota koperasi juga menunjukkan bahwa penyampaian laporan SHU dilakukan setiap tahun melalui RAT. Dalam kegiatan tersebut, anggota diberikan kesempatan untuk bertanya maupun memberikan tanggapan terhadap laporan yang disampaikan. Hal ini sebagaimana disampaikan dalam wawancara berikut:

“Setiap tahun laporan SHU disampaikan pada saat rapat anggota tahunan dan anggota diberikan kesempatan untuk bertanya.”⁶⁸

Selain itu, anggota lain juga menyampaikan bahwa dalam RAT terdapat sesi tanya jawab. Hal tersebut terlihat dari pernyataan berikut:

“Iya, ada sesi tanya jawab.”⁶⁹

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa koperasi memberikan ruang kepada anggota untuk bertanya mengenai laporan

⁶⁷ Sirman. B, Manajer, *wawancara* di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang. 15 April 2026

⁶⁸ Sirman. B, Manajer, *wawancara* di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang. 15 April 2026

⁶⁹ Nurhidayah, Anggota Koperasi, *wawancara* di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang. 17 April 2026

yang disampaikan dalam RAT. Kesempatan bertanya tersebut menjadi salah satu upaya koperasi dalam membuka komunikasi antara pengurus dan anggota terkait laporan SHU dan kondisi koperasi.

Sebagian anggota menilai bahwa penyampaian laporan SHU melalui RAT telah dilakukan secara transparan. Hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan anggota koperasi yang menyampaikan:

“Laporan SHU disampaikan setiap tahun di saat Rapat Anggota Tahunan. Transparan sekali, ada perhitungannya.”⁷⁰

Anggota lainnya juga menyampaikan:

“Iya transparan, karena di saat Rapat Anggota Tahunan itu ditampilkan semuanya.”⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa sebagian anggota menilai penyampaian laporan SHU melalui RAT sudah memberikan keterbukaan informasi. Laporan SHU disampaikan setiap tahun dan anggota dapat mengetahui informasi mengenai pembagian SHU dalam forum tersebut.

Upaya lain yang dilakukan koperasi adalah penggunaan aplikasi dalam proses pencatatan dan pembagian SHU. Berdasarkan hasil wawancara, setelah keuntungan koperasi pada akhir tahun diketahui dan proses tutup buku selesai dilakukan, SHU diproses melalui aplikasi. Melalui aplikasi tersebut, pembagian SHU dapat dilakukan ke rekening masing-masing anggota secara lebih cepat.

Penggunaan aplikasi membantu koperasi dalam proses pelaporan dan pembagian SHU karena data transaksi dan perhitungan dapat diolah melalui sistem. Aplikasi digunakan untuk mencatat transaksi, mengolah data

⁷⁰ Anugrah Ramadani, Teller/Anggota Koperasi, wawancara di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang. 17 April 2026

⁷¹ Hartati, Anggota Koperasi, wawancara di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang. 17 April 2026

keuangan, dan memproses pembagian SHU setelah tutup buku dilakukan. Dengan adanya aplikasi, proses pencatatan dan pembagian SHU menjadi lebih teratur dan dapat dilakukan dengan lebih cepat.

Namun, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa masih terdapat anggota yang belum sepenuhnya memahami mekanisme perhitungan SHU secara rinci. Sebagian anggota hanya mengetahui bahwa SHU berasal dari simpanan atau dana yang mengendap dalam koperasi. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh salah satu anggota koperasi:

“Belum sepenuhnya paham, hanya yang tadi saya ucapkan bahwa SHU itu dari hasil tabungan atau dari dana yang mengendap.”⁷²

Berdasarkan kutipan tersebut, dapat diketahui bahwa masih terdapat anggota yang belum memahami secara menyeluruh proses perhitungan SHU. Anggota mengetahui bahwa SHU berkaitan dengan simpanan atau dana yang mengendap, tetapi belum memahami secara rinci bagaimana perhitungan SHU dilakukan dalam sistem koperasi.

Selain itu, terdapat anggota yang memberikan masukan agar laporan SHU disampaikan secara lebih rinci dan terbuka pada saat RAT. Hal tersebut terlihat dari pernyataan berikut:

“Harusnya itu sih setiap RAT, kan SHU sebenarnya ada laporannya, mungkin lebih bagus kalau terperinci dan lebih terbuka lagi.”⁷³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa meskipun laporan SHU telah disampaikan melalui RAT, masih terdapat harapan dari anggota agar penyampaian laporan dilakukan secara lebih rinci. Anggota tidak hanya membutuhkan informasi mengenai jumlah SHU yang

⁷² Nurhidayah, Anggota Koperasi, wawancara di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang, 17 April 2026

⁷³ Nurhidayah, Anggota Koperasi, wawancara di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang, 17 April 2026

diterima, tetapi juga membutuhkan penjelasan yang lebih jelas mengenai rincian dan proses perhitungan SHU.

Selain memberikan tanggapan mengenai laporan SHU, terdapat pula anggota yang mempertanyakan penggunaan dana cadangan untuk menutupi pembiayaan bermasalah atau pembiayaan macet. Menurut manajer koperasi, pertanyaan tersebut muncul ketika terdapat pembiayaan yang sudah tidak dapat ditagih kembali sehingga harus ditutupi melalui dana cadangan koperasi. Hal tersebut disampaikan oleh manajer koperasi sebagai berikut:

“Cuman pernah ada yang menanyakan bahwa jika ada pembiayaan macet itu kan yang bayar anggota dari SHU, itu yang biasanya dipertanyakan, kenapa diambil dari situ, kenapa tidak ditagih saja. Jadi saya mengatakan bagaimana jika sudah meninggal, ini kan bebannya masih ada, jadi tiap tahun itu kami ada dana cadangan, semua pembiayaan-pembiayaan macet itu diambil dari SHU untuk menutupi ini yang bermasalah. Sebenarnya ini kan untuk keberlangsungan koperasi agar tidak banyak yang bermasalah, tapi yang betul-betul memang sudah dipilah, kalau bisa ditagih kami tagih, tapi kalau jika sudah meninggal kan tidak mungkin.”⁷⁴

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa anggota memiliki perhatian terhadap penggunaan dana koperasi, termasuk dana yang berkaitan dengan SHU dan pembiayaan bermasalah. Koperasi menjelaskan bahwa dana cadangan digunakan untuk menutupi pembiayaan bermasalah tertentu, terutama apabila pembiayaan tersebut sudah tidak dapat ditagih kembali. Penjelasan tersebut diberikan agar anggota memahami alasan penggunaan dana tersebut dalam pengelolaan koperasi.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara, upaya Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan pembagian SHU dilakukan melalui penyampaian laporan SHU dalam RAT, penggunaan aplikasi untuk memproses pencatatan

⁷⁴ Sirman. B, Manajer, wawancara di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang. 15 April 2026

dan pembagian SHU, pemberian kesempatan kepada anggota untuk mengecek jumlah SHU masing-masing, serta pemberian ruang bagi anggota untuk bertanya dan memberikan tanggapan. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa sebagian anggota menilai laporan SHU telah disampaikan secara transparan, namun masih terdapat anggota yang mengharapkan laporan SHU disampaikan secara lebih rinci dan mudah dipahami.

3. Kendala dalam Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban terhadap Pelaporan Sisa Hasil Usaha di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan, penerapan akuntansi pertanggungjawaban terhadap pelaporan Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang telah berjalan dalam beberapa aspek, seperti adanya pembagian tugas, penggunaan aplikasi dalam pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan, serta penyampaian laporan SHU kepada anggota koperasi melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT). Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang menyebabkan penerapan akuntansi pertanggungjawaban belum berjalan secara optimal.

Kendala pertama berkaitan dengan belum adanya indikator kinerja yang ditetapkan secara khusus pada masing-masing bagian koperasi. Berdasarkan hasil wawancara, evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pada bagian pengelola masih dilakukan melalui pengawasan langsung oleh manajer. Evaluasi tersebut belum menggunakan ukuran kinerja atau indikator tertentu yang disusun secara terstruktur.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Bapak Sirman B. selaku Manajer Koperasi Amanah Mulia Ikhlas:

“Kalau untuk evaluasi tugas masing-masing itu sebenarnya yang berperan penting di koperasi itu cuman pengelola, karena pengurus sebenarnya tidak terlalu terlibat, kecuali pada saat ada kebijakan-

kebijakan penting, kalau mengenai evaluasi-evaluasi untuk tugas di bawah manajer, itu semua ada di manajer bagaimana supaya bisa ditingkatkan kinerja teman-teman yang lain tidak ada indikator-indikator tertentu.”⁷⁵

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa evaluasi terhadap tugas masing-masing bagian lebih banyak dilakukan oleh manajer. Pengurus tidak selalu terlibat dalam evaluasi tugas harian, kecuali apabila terdapat kebijakan penting yang perlu dibahas. Evaluasi kinerja belum menggunakan indikator tertentu, tetapi masih bergantung pada pengawasan langsung oleh manajer.

Kendala berikutnya berkaitan dengan belum terbentuknya pusat-pusat pertanggungjawaban secara spesifik. Koperasi memang telah memiliki pembagian tugas pada setiap bagian, seperti manajer, administrasi, teller, dan kolektor. Namun, pembagian tersebut belum diformalkan sebagai pusat-pusat pertanggungjawaban yang memiliki batas wewenang, tanggung jawab, dan target tertentu.

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara bersama manajer koperasi yang menyatakan:

“Dulu pernah ada, sekarang sudah tidak karena SDM di sini tidak terlalu banyak jadi kami tidak terlalu menekankan hal yang seperti itu, jadi mengenai target tidak ada, artinya kita bekerja sesuai porsi masing-masing, kolektor kerjanya bagaimana, manajer kerjanya bagaimana seperti memilah siapa-siapa pembiaya yang bisa diproses, teller tugasnya untuk melayani anggota koperasi.”⁷⁶

Berdasarkan kutipan tersebut, dapat diketahui bahwa pembentukan pusat pertanggungjawaban secara khusus pernah dilakukan, tetapi saat ini tidak terlalu ditekankan karena jumlah sumber daya manusia yang terbatas.

⁷⁵ Sirman. B, Manajer, wawancara di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang. 15 April 2026

⁷⁶ Sirman. B, Manajer, wawancara di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang. 15 April 2026

Masing-masing bagian tetap menjalankan tugas sesuai porsinya, tetapi belum terdapat target atau ukuran khusus yang menjadi dasar penilaian pada setiap bagian.

Selain itu, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan operasional koperasi masih dilakukan dengan budaya saling membantu antarbagian. Meskipun setiap bagian memiliki tugas masing-masing, dalam praktiknya setiap bagian dapat saling membantu apabila terdapat kegiatan tertentu. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh manajer koperasi:

“Setiap bagian ada tugasnya masing-masing, tapi tetap saling bantu kalau ada kegiatan.”⁷⁷

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa pembagian tugas di koperasi tetap berjalan, tetapi pelaksanaannya masih bersifat fleksibel. Setiap bagian memiliki tugas masing-masing, namun pada kegiatan tertentu tetap saling membantu sesuai kebutuhan di lapangan.

Kendala lain dalam penerapan akuntansi pertanggungjawaban berkaitan dengan pengelompokan biaya terkendali dan tidak terkendali. Berdasarkan hasil penelitian, koperasi belum melakukan pengelompokan biaya terkendali dan tidak terkendali secara khusus. Pengeluaran biaya masih disesuaikan berdasarkan kebutuhan operasional koperasi selama periode berjalan.

Hal tersebut terlihat dari hasil wawancara dengan manajer koperasi yang menjelaskan bahwa pengeluaran biaya pada koperasi lebih banyak mengikuti kebutuhan kegiatan operasional yang terjadi. Koperasi belum secara khusus memisahkan biaya berdasarkan biaya yang dapat dikendalikan

⁷⁷ Sirman. B, Manajer, wawancara di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang. 15 April 2026

oleh bagian tertentu dan biaya yang tidak dapat dikendalikan oleh bagian tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa pengendalian biaya pada koperasi masih dilakukan secara sederhana. Biaya dikeluarkan berdasarkan kebutuhan operasional dan belum dikelompokkan secara rinci berdasarkan tanggung jawab masing-masing bagian. Kondisi ini menjadi salah satu kendala dalam penerapan akuntansi pertanggungjawaban terhadap pelaporan SHU.

Selain kendala pada sistem pertanggungjawaban internal, hasil penelitian juga menunjukkan adanya perbedaan tingkat pemahaman anggota terhadap mekanisme pembagian SHU. Sebagian anggota telah memahami bahwa SHU dibagikan berdasarkan jumlah modal dan dana yang mengendap dalam koperasi. Namun, sebagian anggota lainnya belum memahami secara rinci proses perhitungan SHU yang dilakukan koperasi.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh salah satu anggota koperasi:

“Belum sepenuhnya paham, hanya yang tadi saya ucapkan bahwa SHU itu dari hasil tabungan atau dari dana yang mengendap.”⁷⁸

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa masih terdapat anggota yang belum sepenuhnya memahami mekanisme perhitungan SHU. Anggota mengetahui bahwa SHU berkaitan dengan simpanan atau dana yang mengendap, tetapi belum memahami secara rinci proses perhitungan yang dilakukan oleh koperasi.

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa masih terdapat anggota yang belum sepenuhnya memahami mekanisme perhitungan SHU. Anggota mengetahui bahwa SHU berkaitan dengan

⁷⁸ Nurhidayah, Anggota Koperasi, wawancara di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang, 17 April 2026

simpanan atau dana yang mengendap, tetapi belum memahami secara rinci proses perhitungan yang dilakukan oleh koperasi.

Perbedaan tingkat pemahaman anggota juga terlihat dari adanya anggota yang mengharapkan laporan SHU disampaikan lebih rinci pada saat RAT. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh anggota koperasi:

“Harusnya itu sih setiap RAT, kan SHU sebenarnya ada laporannya, mungkin lebih bagus kalau terperinci dan lebih terbuka lagi.”⁷⁹

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa sebagian anggota mengharapkan informasi mengenai laporan SHU dapat disampaikan secara lebih rinci. Anggota tidak hanya membutuhkan informasi mengenai jumlah SHU yang diterima, tetapi juga penjelasan yang lebih jelas mengenai rincian laporan dan proses perhitungan SHU.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi dalam proses pencatatan dan perhitungan SHU membantu koperasi dalam mempercepat pelaporan. Namun, anggota pada umumnya hanya melihat hasil akhir pembagian SHU tanpa memahami proses pengolahan data yang dilakukan oleh sistem. Dengan demikian, aplikasi membantu proses pencatatan dan pelaporan, tetapi pemahaman anggota terhadap mekanisme perhitungan SHU masih perlu diperhatikan.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara, kendala dalam penerapan akuntansi pertanggungjawaban terhadap pelaporan SHU pada Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang tidak lagi berfokus pada kendala teknis pencatatan, karena pencatatan telah dibantu dengan penggunaan aplikasi. Kendala yang ditemukan lebih mengarah pada pengelolaan pertanggungjawaban dan pemahaman anggota, yaitu belum adanya indikator kinerja yang terstruktur, belum terbentuknya pusat-pusat pertanggungjawaban

⁷⁹ Nurhidayah, Anggota Koperasi, wawancara di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang, 17 April 2026

secara spesifik, belum adanya pemisahan biaya terkendali dan tidak terkendali, serta masih adanya perbedaan pemahaman anggota terhadap mekanisme perhitungan SHU.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban dalam Penyusunan dan Pembagian Sisa hasil Usaha (SHU)

Berdasarkan hasil penelitian, koperasi Amanah Mulia Ikhlas telah memiliki struktur organisasi yang tersusun secara formal, yang terdiri dari Rapat Anggota Tahunan (RAT), pengurus, pengawas, serta pengelola koperasi. Pada bagian pengelola terdapat pembagian tugas yang lebih rinci, seperti manajer, administrasi, teller, dan kolektor. Pembagian tugas tersebut menunjukkan bahwa koperasi telah menerapkan pembagian wewenang dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan operasional koperasi.

Adanya pembagian tugas dan tanggung jawab pada masing-masing bagian menunjukkan bahwa koperasi telah menerapkan salah satu unsur akuntansi pertanggungjawaban dalam kegiatan operasionalnya. Pembagian tanggung jawab tersebut membantu proses pengawasan dan pelaksanaan tugas menjadi lebih terarah dalam penyusunan laporan keuangan dan SHU.

Berdasarkan hasil penelitian, penyusunan laporan keuangan dan SHU pada Koperasi Amanah Mulia Ikhlas telah dilakukan menggunakan sistem berbasis aplikasi. Bagian administrasi bertugas melakukan pencatatan transaksi keuangan melalui aplikasi koperasi, sedangkan manajer bertanggung jawab melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap laporan yang disusun sebelum disampaikan kepada pengurus dan anggota koperasi melalui RAT.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa koperasi telah menerapkan beberapa unsur akuntansi pertanggungjawaban dalam proses pengelolaan dan pelaporan keuangan. Adanya pembagian tugas membantu pelaksanaan

kegiatan operasional menjadi lebih terarah serta mempermudah proses pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada masing-masing bagian koperasi.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Nadya Vita Safitri yang menunjukkan bahwa penerapan akuntansi pertanggungjawaban pada koperasi telah berjalan melalui pembagian tugas dan penyusunan laporan keuangan yang cukup baik. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa pembagian tanggung jawab pada setiap bagian membantu pelaksanaan kegiatan operasional koperasi menjadi lebih terarah. Hasil penelitian ini juga menunjukkan kondisi yang serupa, dimana Koperasi Amanah Mulia Ikhlas telah memiliki struktur organisasi dan pembagian tugas yang jelas dalam proses penyusunan laporan keuangan dan SHU.⁸⁰

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa proses pencatatan dan penyusunan laporan keuangan pada koperasi telah menggunakan sistem berbasis aplikasi. Penggunaan aplikasi ini juga telah memenuhi prinsip dasar sistem informasi akuntansi dalam akuntansi pertanggungjawaban, yaitu adanya pencatatan transaksi berdasarkan pusat biaya dan pusat tanggung jawab yang dapat ditelusuri secara jelas. Penggunaan aplikasi membantu koperasi dalam meningkatkan efisiensi pencatatan, mempermudah proses penyusunan laporan SHU, serta mempercepat penyampaian informasi keuangan kepada anggota koperasi. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penggunaan sistem aplikasi memberikan kelebihan dalam bentuk efisiensi waktu, ketepatan data, dan kemudahan dalam penyusunan laporan. Namun demikian, dalam praktiknya koperasi belum memiliki sistem anggaran yang disusun secara rinci berdasarkan pusat pertanggungjawaban. Perencanaan yang dilakukan masih bersifat umum dan disusun berdasarkan hasil RAT serta

⁸⁰ Nadya Vita Safitri, "Analisis Akuntansi Pertanggungjawaban Dalam Penilaian Kinerja Pusat Pendapatan Dan Biaya Pada KSSPS Binama Cabang Tlogasari." 2022

kebutuhan operasional koperasi, bukan berdasarkan target anggaran setiap bagian.

Dalam penerapan akuntansi pertanggungjawaban, secara ideal terdapat perlakuan terhadap hasil usaha yang dapat berupa pembagian kepada pihak-pihak yang berkontribusi serta alokasi dana cadangan atau dana yang ditahan untuk pengembangan koperasi. Pada Koperasi Amanah Mulia Ikhlas, SHU dialokasikan kepada anggota, pengurus, pengawas, pengelola, serta dana sosial, pendidikan, dan pembinaan. Namun demikian, tidak terdapat pemisahan eksplisit antara SHU yang ditahan dan yang dibagikan dalam bentuk laba ditahan seperti pada perusahaan, melainkan lebih kepada alokasi dana koperasi sesuai kesepakatan RAT.

Meskipun telah didukung oleh sistem aplikasi, hasil penelitian masih menunjukkan bahwa penerapan akuntansi pertanggungjawaban pada koperasi belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari belum adanya indikator kinerja yang ditetapkan secara khusus pada masing-masing bagian serta belum terbentuknya pusat-pusat pertanggungjawaban secara spesifik. Evaluasi terhadap pelaksanaan tugas masih lebih berfokus pada pengawasan manajer dan belum dilakukan menggunakan ukuran kinerja yang terstruktur.

Kondisi tersebut menyebabkan proses evaluasi kinerja belum dapat dilakukan secara terukur sehingga pengawasan terhadap pelaksanaan tugas masih dilakukan secara sederhana. Selain itu, belum terbentuknya pusat pertanggungjawaban juga menyebabkan batas tanggung jawab pada masing-masing bagian belum sepenuhnya jelas dalam perspektif akuntansi pertanggungjawaban.

Menurut peneliti, kondisi tersebut terjadi karena koperasi masih lebih berfokus pada kelancaran operasional dan menjaga hubungan kerja sama antarbagian dibandingkan penerapan sistem pengendalian formal yang lebih terstruktur. Hal ini terlihat dari adanya budaya saling membantu antarbagian

dalam pelaksanaan kegiatan koperasi. Meskipun kondisi tersebut membantu menjaga kelancaran operasional koperasi, namun dalam perspektif akuntansi pertanggungjawaban hal tersebut menyebabkan pengendalian dan evaluasi kinerja belum berjalan secara optimal.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pembagian SHU pada koperasi dilakukan berdasarkan jumlah modal dan lamanya dana anggota mengendap dalam koperasi. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa koperasi telah menerapkan prinsip keadilan dalam pembagian SHU karena anggota yang memberikan kontribusi lebih besar akan memperoleh SHU yang lebih besar pula.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Mutia, dkk. yang menyatakan bahwa pembagian SHU dilakukan berdasarkan partisipasi dan kontribusi anggota dalam koperasi. Dalam penelitian ini, pembagian SHU juga dilakukan secara proporsional berdasarkan jumlah modal dan saldo rata-rata dana anggota yang mengendap dalam koperasi.⁸¹

Dalam perspektif teori stakeholder, koperasi memiliki tanggung jawab untuk memberikan manfaat dan informasi yang adil kepada seluruh anggota sebagai pihak yang berkepentingan dalam koperasi. Oleh karena itu, pembagian SHU yang dilakukan berdasarkan kontribusi anggota menunjukkan adanya upaya koperasi dalam memenuhi hak anggota secara proporsional. Dengan demikian, pembagian SHU tidak hanya mencerminkan aspek ekonomi, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan dan keseimbangan hubungan antar pihak dalam koperasi.

⁸¹ Mutia, dkk. "Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban dalam Penilaian Kinerja pada KSP Kopdit Hiro Heling." Universitas Nusa Nipa, Indonesia" 13, no. 1 (2026): 220–41.

2. Upaya dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Pembagian SHU

Berdasarkan hasil penelitian, Koperasi Amanah Mulia Ikhlas telah melakukan beberapa upaya dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan SHU kepada anggota koperasi. Upaya tersebut dilakukan melalui penggunaan sistem aplikasi dalam proses pencatatan dan pelaporan keuangan, penyampaian laporan SHU melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT), serta pemberian kesempatan kepada anggota untuk mengetahui dan memberikan tanggapan terhadap laporan yang disampaikan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan transparansi tidak hanya dilakukan pada aspek pelaporan, tetapi juga pada proses penyampaian informasi kepada anggota sebagai pihak yang berkepentingan dalam koperasi.

Dalam penerapan akuntabilitas dan transparansi, koperasi memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada anggota sebagai stakeholder utama koperasi. Berdasarkan hasil penelitian, koperasi telah memberikan keterbukaan informasi kepada anggota mengenai laporan SHU dan kondisi keuangan koperasi melalui RAT yang dilaksanakan setiap tahun. Dalam konteks ini, RAT berfungsi sebagai forum pengesahan laporan keuangan yang sebelumnya telah dihasilkan melalui sistem aplikasi koperasi, sehingga proses pelaporan SHU merupakan hasil akhir dari sistem pencatatan yang terstruktur, bukan perhitungan langsung dalam forum RAT.

Selain penyampaian laporan dalam RAT, anggota juga diberikan kesempatan untuk bertanya dan memberikan tanggapan terkait laporan yang disampaikan pengurus koperasi. Anggota yang ingin mengetahui jumlah SHU yang diterima juga dapat melakukan pengecekan langsung ke kantor koperasi melalui data yang telah dihasilkan dari sistem aplikasi. Hal ini menunjukkan

adanya keterbukaan akses informasi kepada anggota, meskipun tingkat pemahaman anggota terhadap mekanisme perhitungan SHU masih bervariasi.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Endang Wahyuningsih yang menyatakan bahwa pembagian SHU tidak hanya menjadi kewajiban administratif koperasi, tetapi juga merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada anggota yang harus dilakukan secara adil dan terbuka. Dalam penelitian ini, koperasi juga telah melaksanakan penyampaian laporan SHU melalui RAT dan memberikan kesempatan kepada anggota untuk mengetahui serta memberikan tanggapan terhadap laporan yang disampaikan.⁸²

Penggunaan aplikasi dalam proses pencatatan dan penyusunan laporan keuangan juga menjadi salah satu bentuk upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Sistem aplikasi tersebut membantu koperasi dalam meningkatkan efisiensi pencatatan, mempermudah proses penyusunan laporan SHU, serta mempercepat penyampaian informasi keuangan kepada anggota setelah proses tutup buku dilakukan. Selain itu, penggunaan aplikasi juga berfungsi untuk meminimalkan kesalahan pencatatan dalam proses perhitungan SHU sehingga data yang dihasilkan menjadi lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kondisi tersebut memberikan dampak positif terhadap proses pelaporan keuangan koperasi karena penyusunan laporan menjadi lebih efisien, terstruktur, dan terdokumentasi dengan baik melalui sistem. Dengan demikian, penggunaan aplikasi tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan,

⁸² Endang Wahyuningsih, "Alokasi Dan Pembagian Sisa Hasil Usaha Kepada Anggota Sesuai Prinsip-Prinsip Koperasi.," 2022.

tetapi juga sebagai instrumen pendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan koperasi.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masih terdapat anggota yang belum sepenuhnya memahami mekanisme perhitungan SHU secara rinci. Sebagian anggota hanya mengetahui bahwa SHU dibagikan berdasarkan jumlah simpanan dan dana yang mengendap tanpa memahami proses perhitungan yang dilakukan melalui sistem koperasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa transparansi dalam koperasi tidak hanya berkaitan dengan penyampaian informasi, tetapi juga berkaitan dengan tingkat pemahaman anggota terhadap informasi tersebut.

Menurut peneliti, kondisi tersebut menunjukkan bahwa transparansi dalam koperasi sebenarnya telah berjalan melalui sistem aplikasi dan RAT, namun penyampaian informasi terkait mekanisme perhitungan SHU masih perlu ditingkatkan. Anggota tidak hanya membutuhkan informasi mengenai jumlah SHU yang diterima, tetapi juga membutuhkan pemahaman mengenai proses pembentukan SHU, termasuk dasar perhitungan yang berasal dari sistem pencatatan koperasi. Selain itu, adanya pertanyaan anggota terkait penggunaan dana cadangan untuk menutupi pembiayaan macet menunjukkan bahwa anggota mulai memiliki perhatian terhadap kondisi keuangan koperasi dan pelaksanaan pembagian SHU, sehingga hal tersebut dapat diartikan sebagai bentuk partisipasi aktif anggota dalam fungsi pengawasan koperasi.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa upaya dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan pembagian SHU telah dilakukan oleh koperasi melalui penggunaan sistem aplikasi, penyampaian laporan dalam RAT, serta keterbukaan akses informasi kepada anggota. Namun demikian, dari perspektif akuntansi pertanggungjawaban, upaya tersebut masih dapat ditingkatkan terutama pada aspek edukasi dan pemahaman anggota agar informasi yang disampaikan tidak hanya bersifat

formal, tetapi juga benar-benar dipahami secara menyeluruh oleh seluruh anggota koperasi.

3. Kendala dalam Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban dalam terhadap pelaporan SHU

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan akuntansi pertanggungjawaban pada Koperasi Amanah Mulia Ikhlas telah berjalan dalam beberapa aspek, seperti pembagian tugas, penyusunan laporan keuangan, penggunaan sistem aplikasi, serta penyampaian laporan Sisa Hasil Usaha (SHU) kepada anggota koperasi melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT). Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang menyebabkan penerapan akuntansi pertanggungjawaban belum berjalan secara optimal sesuai dengan konsep idealnya.

Dalam penerapan akuntansi pertanggungjawaban, proses pengendalian dan evaluasi kinerja memerlukan adanya pembagian tanggung jawab yang jelas, pengelompokan biaya, serta sistem pengawasan yang terstruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun koperasi telah memiliki pembagian tugas dalam kegiatan operasional, indikator kinerja belum ditetapkan secara khusus pada masing-masing bagian. Evaluasi terhadap pelaksanaan tugas masih lebih berfokus pada pengawasan langsung oleh manajer dan belum menggunakan ukuran kinerja yang terstruktur. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip akuntansi pertanggungjawaban yang menekankan adanya pusat pertanggungjawaban dan pengukuran kinerja secara sistematis belum sepenuhnya diterapkan dalam koperasi.

Kondisi ini menunjukkan bahwa proses evaluasi kinerja pada koperasi belum dilakukan secara terukur. Selain itu, belum terbentuknya pusat-pusat pertanggungjawaban secara spesifik menyebabkan batas tanggung jawab pada

masing-masing bagian koperasi belum sepenuhnya jelas dalam pengawasan dan evaluasi kinerja.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengelompokan biaya terkendali dan tidak terkendali belum dilakukan secara khusus. Pengeluaran biaya masih disesuaikan berdasarkan kebutuhan operasional yang terjadi selama periode berjalan, sehingga sistem pengendalian biaya masih bersifat sederhana.

Kondisi tersebut berdampak pada proses pengawasan dan pengendalian biaya yang belum dapat dilakukan secara optimal karena koperasi belum memiliki pengelompokan biaya yang lebih terstruktur sesuai tanggung jawab masing-masing bagian.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Idola Vanniko Sinambela yang menunjukkan bahwa penerapan akuntansi pertanggungjawaban pada koperasi belum berjalan secara optimal karena pemisahan biaya terkendali dan tidak terkendali belum dilakukan secara jelas serta laporan pertanggungjawaban belum mencerminkan evaluasi kinerja secara maksimal. Dalam penelitian ini, kondisi yang serupa juga ditemukan, dimana evaluasi kinerja masih dilakukan secara sederhana dan belum menggunakan indikator kinerja yang terstruktur.⁸³

Selain kendala dalam sistem pertanggungjawaban, hasil penelitian juga menunjukkan adanya perbedaan tingkat pemahaman anggota terhadap mekanisme pembagian SHU. Sebagian anggota telah memahami bahwa SHU dibagikan berdasarkan jumlah modal dan dana yang mengendap, namun

⁸³ Idola Vanniko Sinambela, “Akuntansi Pertanggungjawaban pada Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri Cabang Medan”. (Medan: Universitas HKBP Nommensen, 2022)

sebagian anggota lainnya belum memahami secara rinci proses perhitungan SHU tersebut.

Perbedaan tingkat pemahaman tersebut menunjukkan bahwa transparansi dalam penyampaian laporan SHU telah berjalan, namun pemahaman anggota terhadap mekanisme perhitungan SHU masih perlu ditingkatkan. Kondisi tersebut dapat memengaruhi tingkat partisipasi anggota dalam memahami laporan pertanggungjawaban koperasi.

Menurut peneliti, kondisi tersebut terjadi karena penyampaian laporan SHU dalam RAT masih lebih berfokus pada hasil akhir pembagian SHU dibandingkan penjelasan rinci mengenai proses perhitungannya. Selain itu, penggunaan sistem aplikasi dalam proses perhitungan SHU menyebabkan anggota hanya melihat hasil akhir tanpa memahami proses pengolahan data yang dilakukan oleh sistem.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi memang membantu meningkatkan efisiensi pelaporan keuangan koperasi, namun belum sepenuhnya meningkatkan pemahaman anggota terhadap mekanisme perhitungan SHU. Dengan demikian, kendala dalam penelitian ini lebih mengarah pada aspek pemahaman anggota dan penguatan sistem pertanggungjawaban dibandingkan kendala teknis pelaporan keuangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam penyusunan dan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan akuntansi pertanggungjawaban pada Koperasi Amanah Mulia Ikhlas telah berjalan dalam beberapa aspek, seperti adanya struktur organisasi dan pembagian tugas, penyusunan anggaran operasional, penggunaan aplikasi dalam pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan, serta penyampaian laporan SHU kepada anggota melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT). Pembagian SHU dilakukan berdasarkan jumlah modal dan lamanya dana anggota mengendap dalam koperasi sehingga pembagian dilakukan secara proporsional sesuai kontribusi anggota. Penggunaan aplikasi juga membantu meningkatkan efisiensi pencatatan dan mempermudah proses penyusunan laporan SHU. Namun, penerapan akuntansi pertanggungjawaban belum sepenuhnya optimal karena belum terdapat indikator kinerja yang jelas pada masing-masing bagian serta pemisahan biaya terkendali dan tidak terkendali belum dilakukan secara khusus, dan pusat-pusat pertanggungjawaban belum terbentuk secara spesifik.
2. Upaya dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan SHU dilakukan melalui penggunaan aplikasi dalam proses pencatatan dan pelaporan keuangan, penyampaian laporan SHU melalui RAT, pemberian kesempatan kepada anggota untuk bertanya dan memberikan tanggapan, serta keterbukaan koperasi dalam memberikan informasi terkait SHU anggota. Upaya tersebut menunjukkan bahwa koperasi telah berusaha menerapkan prinsip transparansi dan pertanggungjawaban kepada anggota. Namun demikian, koperasi masih perlu meningkatkan pemahaman anggota terkait

mekanisme perhitungan SHU agar keterbukaan informasi tidak hanya sebatas penyampaian hasil akhir pembagian SHU, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai proses perhitungannya.

3. Kendala dalam penerapan akuntansi pertanggungjawaban terhadap pelaporan SHU pada Koperasi Amanah Mulia Ikhlas tidak lagi berfokus pada aspek teknis pencatatan dan pelaporan keuangan karena proses tersebut telah dibantu dengan penggunaan aplikasi. Kendala yang ditemukan lebih mengarah pada aspek pengelolaan pertanggungjawaban dan pemahaman anggota terhadap mekanisme pembagian SHU. Evaluasi kinerja masih dilakukan secara sederhana dan belum menggunakan ukuran kinerja yang terstruktur. Selain itu, masih terdapat anggota yang belum sepenuhnya memahami proses perhitungan SHU secara rinci sehingga pemahaman anggota terhadap mekanisme SHU masih berbeda-beda.

Secara keseluruhan, koperasi telah menerapkan akuntansi pertanggungjawaban dan upaya transparansi SHU dengan baik, namun masih terdapat ruang untuk perbaikan, terutama dalam penguatan indikator kinerja, pemahaman anggota, dan pengelompokan biaya. Hal ini penting agar transparansi dan akuntabilitas koperasi dapat berjalan optimal, efisien, dan dipahami secara menyeluruh oleh seluruh anggota.

B. Saran

Berdasarkan penjelasan dan kenyataan yang telah didapatkan oleh peneliti terhadap penelitian yang dilakukan dengan judul Analisis Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban dalam Laporan Pembagian Sisa Hasil Usaha di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang maka saran yang peneliti berikan yaitu:

1. Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang

Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang disarankan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SHU melalui penyajian laporan yang lebih jelas dan mudah dipahami oleh anggota. Selain penyampaian

dalam RAT, koperasi dapat menyediakan ringkasan laporan SHU dengan penjelasan sederhana mengenai komponen perhitungan. Koperasi juga perlu mengembangkan penerapan akuntansi pertanggungjawaban secara lebih terstruktur melalui penetapan pusat pertanggungjawaban yang jelas serta penyusunan indikator kinerja pada masing-masing unit kerja. Koperasi juga disarankan untuk meningkatkan pemahaman anggota melalui penyampaian informasi yang lebih komunikatif, serta memperkuat komunikasi antara pengelola dan anggota. Dalam hal, optimalisasi penggunaan aplikasi dapat dimanfaatkan tidak hanya sebagai alat pencatatan, tetapi juga sebagai media penyampaian informasi kepada anggota.

2. Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji penerapan akuntansi pertanggungjawaban pada koperasi dengan pendekatan yang lebih beragam, baik melalui metode kuantitatif maupun kombinasi metode, serta pada objek penelitian yang berbeda. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat lebih mendalami aspek pemahaman dan partisipasi anggota dalam sistem pertanggungjawaban koperasi guna memberikan gambaran yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Juz 1-30 Edisi Baru (Surabaya: Mekar Surabaya, 2019).
- Abdussamad. "Metode Penelitian Kualitatif". (Makassar: Syakir Media Press, 2021).
- Atmadji. "Faktor-Faktor Yang Menentukan Besarnya Sisa Hasil Usaha Koperasi Dari Aspek Keuangan Dan Non-Keuangan Di Indonesia." (*Bisnis Dan Manajemen* 7, No. 2 2022) 215
- Creswell, J. W. "*Research Design: Pendekatan, Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed.*" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021).
- Denny Adhriana. "Akuntabilitas Publik". (Yogyakarta: Deepublish Digital, 2024).
- Dewi Sadiyah. "Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif,." (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019).
- Doko, dkk. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sisa Hasil Usaha (SHU) di KSU Talenta Kupang," no. 25 (2019): 1505–17.
- Emzir. "Analisis Data: Metode Penelitian Kualitatif." (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).
- Endang Wahyuningsih. "Alokasi Dan Pembagian Sisa Hasil Usaha Kepada Anggota Sesuai Prinsip-Prinsip Koperasi." (2022).
- Firdausy, Carunia Mulya. "Koperasi Dalam Sistem Perekonomian Indonesia". (Edited by Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta, 2018).
- Freeman, R. Edward, and Dkk. "*Stakeholder Theory: The State of the Art.*" Cambridge: (Cambridge University Press, 2019).
- Freeman, R Edward. "*Strategic Management: A Stakeholder Approach.*" 9Boston: Pitman Publishing, 2021).
- Hansen, and Mowen. "*Managerial Accounting: The Cornerstone of Business Decision-Making*". (Edited by 7. Cengage Learning, 2019).
- Harahap, Sofyan Syafri. "Akuntansi Manajemen." (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2024).

- Kartasapoetra dkk. "Koperasi Indonesia Yang Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945." (Revisi. Jakarta: Bumi Aksara, 2021).
- Kristijadi, Iramani dan E. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sisa Hasil Usaha Koperasi Unit Desa Di Jawa Timur." (*Ventura* 1, No.2, 2022): 75.
- Mardiasmo. "Akuntansi Sektor Publik". (Yogyakarta: Andi, 2018).
- Miles, M.B & Huberman A.M. "Analisis Data Kualitatif. Terjemahan Oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. 2021. (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2021).
- Mowen, Hansen dan. "*Cost Management: Accounting and Control.*" (USA: South-Western, 2025).
- Mulyadi. "Akuntansi Biaya." Edisi 5. C. (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2019).
- Mulyadi. "Akuntansi Manajemen". (Jakarta: Salemba Empat, 2019).
- Mulyadi. "Auditing". (Jakarta: Salemba Empat, 2021).
- Murhaban, and Adnan. "Sistem Pengendalian Manajemen." (Aceh: CV. Sefa Bumi Persada, 2020).
- Nadya Vita Safitri. "Analisis Akuntansi Pertanggungjawaban Dalam Penilaian Kinerja Pusat Pendapatan Dan Biaya Pada KSSPS Binama Cabang Tlogasari". (2022).
- Partomo, dkk. "Ekonomi Skala Kecil Atau Menengah Dan Koperasi." (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2022).
- Sitio dan Tamba. "Koperasi : Teori Dan Praktik." (Jakarta: Erlangga, 2001).
- Sudaryono. "Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Mix Method." (Depok: PT. Raja Grafindo Persada., 2019).
- Sugiyono. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (*Mixed Methods*)". (Bandung: Alfabeta., 2021).
- Sugiyono. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D." (Bandung: Alfabeta, 2019).
- Sugiyono. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D." (Bandung: Alfabeta, 2018.)

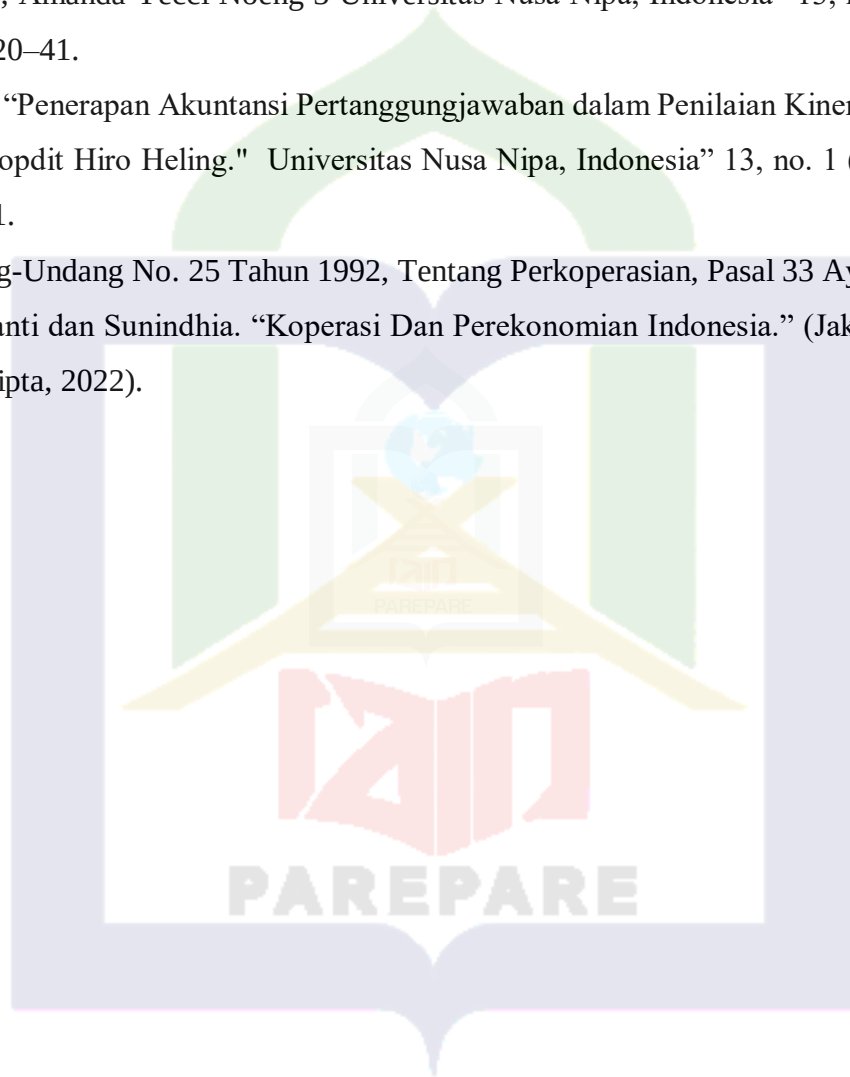
Suryabrata, Sumandi. "Metodologi Penelitian." (Edited by Do. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020).

Timur, Alok, and Kabupaten Sikka. "Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban dalam Penilaian Kinerja pada KSP Kopdit Hiro Heling". P Mutia 1 , Maria Nona Dince 2 , Amanda Yecci Noeng 3 Universitas Nusa Nipa, Indonesia" 13, no. 1 (2026): 220–41.

Mutia, "Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban dalam Penilaian Kinerja pada KSP Kopdit Hiro Heling." Universitas Nusa Nipa, Indonesia" 13, no. 1 (2026): 220–41.

Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, Tentang Perkoperasian, Pasal 33 Ayat 1, n.d.

Widiyanti dan Sunindhia. "Koperasi Dan Perekonomian Indonesia." (Jakarta: Rineka Cipta, 2022).



LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Penetapan Pembimbing



DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
NOMOR : B-2938/in.39/FEBI.04/PP.00.9/06/2025

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAEREPARE

- Menimbang**
- Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi/tugas akhir mahasiswa FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa tahun 2025
 - Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk disertai tugas sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa.
- Mengingat**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor: 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Memperhatikan :**
- Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-025.04.2..307381/2024, tanggal 02 Desember 2024 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2025
 - Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor: 361 Tahun 2024, tanggal 21 Pebruari 2024 tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam;
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :**
- Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2025
 - Menunjuk saudara: **Rini Purnamasari, S.E., M.Ak.**, sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir bagi mahasiswa :
 Nama Mahasiswa : NUR AZIZAH
 NIM : 2220203862201047
 Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
 Judul Penelitian : ANALISIS AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN ATAS DANA HIBAH DAN SOSIAL DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP PINRANG
 - Tugas pembimbing adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi/tugas akhir;
 - Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;
 - Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Parepare
Pada tanggal 10 Juni 2025



Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

2. Berita Acara Revisi Judul Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8 Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 Fax.24404
Po Box 909 Parepare 91100 website : www.iainpare.ac.id, email : mail@iainpare.ac.id

**BERITA ACARA
REVISI JUDUL SKRIPSI**

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menyatakan bahwa Mahasiswa:

Nama : Nur Azizah
N I M : 2220203862201047
Prodi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Menerangkan bahwa judul skripsi semula:

ANALISIS AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN ATAS DANA HIBAH DAN SOSIAL DI
BANK SYARIAH INDONESIA KCP PINRANG

Telah diganti dengan judul baru:

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN DALAM LAPORAN
PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA DI KOPERASI AMANAH MULIA IKHLAS KABUPATEN
PINRANG

dengan alasan / dasar:

Perubahan judul dilakukan karena objek penelitian sebelumnya memiliki keterbatasan data terkait dana hibah dan dana sosial serta keterbatasan akses informasi yang diperlukan peneliti.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 15 Juni 2026

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Rini Purnamasari, M.Ak

Mengetahui
Dekan,



Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I.
NIP. 197811012009121003

3. Surat Izin Meneliti dari kampus



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-671/In.39/FEBI.04/PP.00.9/04/2026 07 April 2026

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: NUR AZIZAH
Tempat/Tgl. Lahir	: KAMP. BARU, 12 September 2004
NIM	: 2220203862201047
Fakultas / Program Studi	: Ekonomi dan Bisnis Islam / Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: JALAN VETERAN, DESA PACONGANG, KECAMATAN PALLETEANG, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah BUPATI PINRANG dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN DALAM LAPORAN PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA PADA KOPERASI AMANAH MULIA IKHLAS KABUPATEN PINRANG

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 07 April 2026 sampai dengan tanggal 07 Mei 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

3. Surat Izin Meneliti dari DPMPTSP



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
Nomor : 503/0141/PENELITIAN/DPMPTSP/04/2026

Tentang
SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 09-04-2026 atas nama NUR AZIZAH, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
10. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan :

1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0154/R/T.Teknis/DPMPTSP/04/2026, Tanggal : 10-04-2026
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0141/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/04/2026, Tanggal : 10-04-2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8
3. Nama Peneliti : NUR AZIZAH
4. Judul Penelitian : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN DALAM LAPORAN PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA PADA KOPERASI AMANAH MULIA IKHLAS KABUPATEN PINRANG
5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian : PENGURUS KOPERASI TARGET MEMPEROLEH GAMBARAN DAN EVALUASI TERHADAP SHU
7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Paletang

KEDUA : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 10-10-2026.

KETIGA : Peneliti wajib menaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 10 April 2026





Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP.,M.Si
NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-





Balai Sertifikasi Elektronik



CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM



ZONA HIJAU



OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA

DPMPTSP

4. Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Koperasi

KOPERASI AMANAH MULIA IKHLAS
PINRANG - INDONESIA


KAMI

شركة أمانة عزة وإخلاص التعاونية
بين رانج - إندونيسيا

JALAN VETERAN BARAT - Telp 0821 1133 3963, PINRANG - INDONESIA

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SIRMAN B., SKM

Jabatan : Manager

Menerangkan bahwa :

Nama : NUR AZIZAH

NIM : 2220203862201047

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare

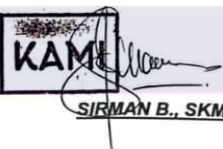
Adalah benar telah melaksanakan penelitian perihal **ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN DALAM KAPORAN PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA DI KOPERASI AMAAH MULIA IKHLAS PINRANG.**

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pinrang, 12 Mei 2026

KOPERASI AMANAH MULIA IKHLAS

 
SIRMAN B., SKM

5. Surat Keterangan Wawancara Informan

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda di bawah ini

Nama : SIRMAN B

Status : MANAGER

Menerangkan bahwa

Nama : Nur Azizah

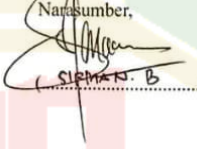
NIM : 2220203862201047

Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Fakultas/Prodi : FEBI/Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Benar mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"Analisis Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban dalam Laporan Pembagian Sisa Hasil Usaha di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang."**

Dengan demikian ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 15 April 2026
Narasumber,

(SIRMAN B)

IAIN
PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda di bawah ini

Nama : A. ANVERAH. RAMADHANI
Status : TEHER / ANGGOTA KOPERASI

Menerangkan bahwa

Nama : Nur Azizah
NIM : 2220203862201047
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Fakultas/Prodi : FEBI/Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Benar mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban dalam Laporan Pembagian Sisa Hasil Usaha di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang."

Dengan demikian ini saya berikan untuk dpergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 17 April 2026

Narasumber,


(.....)



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda di bawah ini

Nama : *Nurdayah*
Status : *Anggota Koperasi*

Menerangkan bahwa

Nama : Nur Azizah
NIM : 2220203862201047
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Fakultas/Prodi : FEBI/Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Benar mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "**Analisis Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban dalam Laporan Pembagian Sisa Hasil Usaha di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang.**"

Dengan demikian ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, *17* April 2026

Narasumber,
[Signature]
(.....)



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda di bawah ini

Nama : Hartati
Status : Anggota Koperasi

Menerangkan bahwa

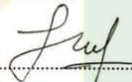
Nama : Nur Azizah
NIM : 2220203862201047
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Fakultas/Prodi : FEBI/Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Benar mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban dalam Laporan Pembagian Sisa Hasil Usaha di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang."

Dengan demikian ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 17 April 2026

Narasumber,

(..........)



6. Instrumen Wawancara

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91132 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : NUR AZIZAH
 NIM : 2220203862201047
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 PRODI : AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
 JUDUL : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI
 PERTANGGUNGJAWABAN DALAM LAPORAN
 PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA DI KOPERASI
 AMANAH MULIA IKHLAS KABUPATEN
 PINRANG.

Pedoman Wawancara untuk Manajer

1. Bagaimana struktur organisasi koperasi disusun dan bagaimana pembagian tugas serta tanggung jawab setiap bagian, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan SHU?
2. Bagaimana proses penyusunan anggaran tahunan dilakukan dan siapa saja yang terlibat dalam proses tersebut?
3. Apakah hasil penyusunan anggaran atau rencana tersebut digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan koperasi?
4. Bagaimana koperasi melihat kembali pelaksanaan anggaran atau rencana kegiatan yang telah disusun?
5. Bagaimana manajemen menetapkan pusat-pusat pertanggungjawaban dalam koperasi? Apakah tiap bagian memiliki batas tugas dan beban biaya yang jelas?

6. Bagaimana proses pencatatan keuangan (pemasukan dan Pengeluaran) di koperasi ini sampai menjadi dasar perhitungan SHU?
7. Bagaimana manajemen mengevaluasi pelaksanaan tugas setiap unit dalam penyusunan laporan SHU?
8. Apa saja kesulitan yang sering terjadi dalam penyusunan dan pembagian SHU?
9. Bagaimana proses penyampaian dan pertanggungjawaban laporan SHU kepada anggota dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT)?
10. Apa upaya yang dilakukan manajemen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan pembagian SHU?
11. Bagaimana proses pengumpulan, pencatatan, dan pengolahan data keuangan hingga menjadi laporan SHU?
12. Apa saja komponen yang diperhitungkan dalam penyusunan SHU?
13. Bagaimana mekanisme penentuan dan pembagian SHU kepada anggota?
14. Bagaimana koperasi mengelompokkan biaya dalam pencatatan keuangan?
15. Apa saja hambatan yang biasanya terjadi dalam proses pencatatan atau penyusunan laporan SHU?
16. Bagaimana koperasi memastikan laporan SHU tersusun secara akurat, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada anggota?
17. Apakah pernah terdapat koreksi atau masukan dari anggota terkait laporan SHU? Bagaimana tindak lanjutnya?

Pedoman Wawancara untuk Anggota Koperasi

1. Apakah Bapak/Ibu menerima laporan Sisa Hasil Usaha (SHU) setiap tahun?
2. Bagaimana cara koperasi menyampaikan laporan dan pembagian SHU kepada anggota?
3. Apakah Bapak/Ibu memahami dasar atau komponen yang digunakan dalam perhitungan SHU?
4. Apakah anggota diberikan kesempatan untuk bertanya atau memberikan tanggapan terkait laporan SHU dalam RAT?

5. Menurut Bapak/Ibu, apakah laporan dan pembagian SHU sudah transparan dan mudah dipahami?
6. Apakah pernah terdapat ketidakjelasan atau permasalahan terkait SHU?
7. Apa saran Bapak/Ibu agar pengelolaan dan pelaporan SHU menjadi lebih transparan dan akuntabel?



7. Transkrip Wawancara

Peneliti: Nur Azizah

Narasumber: Sirman B

Jabatan: Manajer

Waktu/Tempat: 15 April 2026/Koperasi Amanah Mulia Ikhlas

	Materi Wawancara
Peneliti	Bagaimana struktur organisasi koperasi disusun dan bagaimana pembagian tugas serta tanggung jawab setiap bagian, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan SHU?
Narasumber	Struktur di koperasi kami itu, di puncaknya itu di RAT, semua keputusan ada di RAT, di bawah RAT ada pengurus yang tanggung jawab sama kebijakan, setelah pengurus ada pengawas yang awasi kegiatan-kegiatan koperasi dan laporan keuangan, setelah pengawas koperasi ada pengelola, nah pada pengelola terbagilah manajer yang tanggung jawab terhadap operasional koperasi, terus administrasi mencatat dan arsip data koperasi, ada teller yang bertugas melayani transaksi nasabah kemudian kolektor yang tuasnya itu ya penagihan dan monitoring pembayaran. Kalau yang berkaitan dengan masalah SHU, inikan shu sebenarnya keuntunga, jadi kalau berkaitan mengenai tugasnya, sebenarnya semua mempunyai tugas penting terhadap shu ini, karena masing-masing bertugas untuk bagaimana cara mengembangkan supaya kita dapat keuntungan banyak.
Peneliti	Bagaimana proses penyusunan anggaran tahunan dilakukan dan siapa saja yang terlibat dalam proses tersebut?
Narasumber	Kalau anggaran tahunan sebenarnya yang susun adalah pengurus, bukan dari pengelola, tapi ini anggaran secara umum atau bagaimana? Karena sebenarnya anggaran tahunan kami tidak ada

	sedetail, kita cuma berdasarkan dari laporan RAT, setelah RAT itu kita susun lagi rencannya ke depan bagaimana, tidak ada rencana keuangan yang bagaimana-bagimana, jadi, kita jalan saja sesuai dengan apa yang menjadi tanggungjawab masing-masing di sini dan apa yang menjadi kebutuhan di kantor ini, mengenai susunan seperti bahwa tahun ini bebannya sekian persen tahun ini segini persen, itu semua di pengurus.
Peneliti	Apakah hasil penyusunan anggaran atau rencana tersebut digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan koperasi?
Narasumber	Iya, biasanya hasil penyusunan rencana setelah RAT itulah yang kemudian dijadikan pegangan untuk kedepannya. Bagaimana kita jalankan kegiatan koperasi lalu kita sesuaikan dengan kebutuhan yang ada di kantor
Peneliti	Bagaimana koperasi melihat kembali pelaksanaan anggaran atau rencana kegiatan yang telah disusun?
Narasumber	Biasanya kalau sudah berjalan nanti dilihat lagi bagaimana pelaksanaannya, apa yang masih perlu diperbaiki atau disesuaikan lagi untuk kegiatan berikutnya
Peneliti	Bagaimana manajemen menetapkan pusat-pusat pertanggungjawaban dalam koperasi? Apakah tiap bagian memiliki batas tugas dan beban biaya yang jelas?
Narasumber	Dulu pernah ada, sekarang sudah tidak karena SDM di sini tidak terlalu banyak jadi kami tidak terlalu menekankan hal yang seperti itu, jadi mengenai target tidak ada, artinya kita bekerja sesuai porsi masing-masing, kolektor kerjanya bagaimana, manajer kerjanya bagaimana seperti memilah siapa-siapa pembiaya yang bisa diproses, teller tugasnya untuk melayani anggota koperasi. Setiap

	bagian ada tugasnya masing-masing, tapi tetap saling bantu kalau ada kegiatan.”
Peneliti	Bagaimana proses pencatatan keuangan (pemasukan dan Pengeluaran) di koperasi ini sampai menjadi dasar perhitungan shu?
Narasumber	begini, kita di sini kan hanya berdasarkan aplikasi saja, jadi tiap tahun untuk laporan-laporan seperti itu sisa diestrak, tidak ada laporan khusus, artinya semua di aplikasi. Di aplikasi itu pada saat kita sudah ekstrak neraca itu sudah bisa kelihatan semua bahwa bebannya tahun ini berapa, keuntungannya tahun ini berapa, nanti kita lihat aplikasi saja yang menentukan, sesuai dengan porsi modal masing-masing.
Peneliti	Bagaimana manajemen mengevaluasi pelaksanaan tugas setiap unit dalam penyusunan laporan SHU?
Narasumber	kalau untuk evaluasi tugas-tugas masing-masing itu sebenarnya yang berperan penting di koperasi itu cuman pengelola, karena pengurus sebenarnya tidak terlalu terlibat, kecuali pada saat ada kebijakan-kebijakan penting, kalau mengenai evaluasi-evaluasi untuk tugas di bawah manajer, itu semua ada di manajer bagaimana supaya bisa ditingkatkan kinerja teman-teman yang lain tidak ada indikator indikator tertentu.
Peneliti	Apa saja kesulitan yang sering terjadi dalam penyusunan dan pembagian SHU?
Narasumber	Kesulitannya tidak ada, karena semuanya memakai aplikasi jadi kita tidak perlu pusing. Tidak sama dengan koperasi-koperasi lain, itukan semuanya masih manual. jadi, laporan dan segala macam yang diperlukan saat rapat anggota itu sangat susah untuk dipenuhi di koperasi lain tapi kami tidak, RAT kami itu tetap di januari di

	awal tahun, koperasi lain itu biasa di april di mei ditor waktunya kan, kalau kita tidak, karena kami tidak disusahkan dengan laporan, langsung.
Peneliti	Bagaimana proses penyampaian dan pertanggungjawaban laporan SHU kepada anggota dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT)?
Narasumber	Jadi, pada saat rapat anggota kami umumkan bahwa keuntungan untuk tahun buku berjala itu sekian, jadi nanti jika masing-masing mau cek shu silahkan ke kantor, karena di 31 desember itukan keuntungan sudah jelas karena sudah dikurangi semua beban, jadi di 31 desember pada saat tutup buku itukan sudah di fix kan, jadi setelah itu langsung kita proses di aplikasi dan bagi ke rekening masing-masing, satu klik saja sudah langsung, yang diumumkan di rat itu total shunya , jadi kalau mau tau shunya berpa silahkan ke kantor untuk cek rekening masing-masing, kecuali yang diperlihatkan di laporan itu 5 penerima shu terbanyak, tapi bukan namanya, tidak boleh karena data pribadi, hanya nominalnya.
Peneliti	Apa upaya yang dilakukan manajemen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan pembagian SHU?
Narasumber	Upayanya sebenarnya tidak ada, saya berpikir bahwa anggota yang ingin tahu mengenai transparansi atau apa segala macam bisa tinggal datang saja ke kantor bertanya karena sekarang tidak ada anggota yang takut mengenai koperasi kita ini karena semua berdasarkan aplikasi, jadi tiap tahun pun laporan kami selalu fix dan seimbang jadi upaya apa lagi, dipertahankan saja bagaimana kepercayaan anggota kepada kami
Peneliti	Bagaimana proses pengumpulan, pencatatan, dan pengolahan data keuangan hingga menjadi laporan SHU?

Narasumber	Sebenarnya kalau untuk pengumpulan datanya tiap hari ada transaksi pembayaran semuanya itu kan langsung diinput di aplikasi, jadi tiap bulan yang jelasnya setiap mau dicek, laporan shu itu sudah kelihatan sebenarnya, Cuma belum fix di akhir tahun, jadi kalau secara pencatatan itu semuanya di aplikasi. Jadi penginputan-penginputan, tapi bukan penginputan sih namanya, seperti yang saya bilang tadi semuanya di aplikasi jadi sudah membagi bagaimana pembagiannya itu sudah diatur semua di aplikasi.
Peneliti	Apa saja komponen yang diperhitungkan dalam penyusunan SHU?
Narasumber	Jadi sebelum kita proses di aplikasi, sudah ada bayangan bahwa shunya segini, jadi sebelum diproses itu kita hitung-hitung sebenarnya, sebenarnya tergantung berapa modalnya di sini, jadi yang banyak modalnya pasti shunya banyak, karena sebenarnya perhitungannya secara fix itu panjang, jadi ini secara umumnya saya kasi contoh saja, saya masukkan investasi di koperasi ini di bulan januari sebanyak 10 jt dan kamu memasukkan juga investasi sebanyak 10 jt di bulan juni, investasi kita kan sama-sama 10 juta, Cuma beda bulan saja, nah, di akhir tahun pada saat pembagian shu di aplikasi itu hasilnya berbeda, saya dapat 1 jt dan kamu dapat 500 rb, kenapa, karena di sini mekanisme pembagiannya itu berdasarkan saldo rata-rata mengendapnya uang, saya kan 1 tahun mengendap dari januari, kalau kamu di pertengahan tahun baru masuk jadi Cuma setengah tahun, jadi kamu Cuma dapat setengahnya dan saya full, walaupun sama nilai investasi kita, itu kalau kalau perhitungan secara umum karena sebenarnya panjang kai lebar kalau mau dijelaskan semua, jadi tergantung berapa banyak investasi dan berapa lama dia mengendap.

Peneliti	Bagaimana mekanisme penentuan dan pembagian SHU kepada anggota?
Narasumber	Berdasarkan modal dan yang menentukan pembagiannya sudah ditentukan oleh aplikasi
Peneliti	Bagaimana koperasi mengelompokkan biaya dalam pencatatan keuangan?
Narasumber	Biaya-biaya sebenarnya di sini tidak ditentukan, tergantung, jadi apa-apa saja kebutuhan. tapi memang ada beban-beban rutin tiap bulan seperti gaji karyawan, bayar lampu tiap bulan itu ada, kecuali beban-beban yang tidak terduga itu kan semuanya secara langsung, tidak memiliki ketentuan.
Peneliti	Apa saja hambatan yang biasanya terjadi dalam proses pencatatan atau penyusunan laporan SHU?
Narasumber	Tidak memiliki hambatan
Peneliti	Bagaimana koperasi memastikan laporan SHU tersusun secara akurat, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada anggota?
Narasumber	Caranya koperasi dengan aplikasi, kami tidak pusing karena ada aplikasi, begini jika kamu mau tahu jumlah simpanan anggota di sini bisa langsung diekstrak ada, tiap tahun, sekarang saja, jika kamu mau tahu neraca sekarang bisa langsung, di akhir tahun juga bisa, karena semuanya bisa di aplikasi. SHU itu pembahasannya sempit sekali, makanya saya heran kamu memilih judul ini.
Peneliti	Apakah pernah terdapat koreksi atau masukan dari anggota terkait laporan SHU? Bagaimana tindak lanjutnya?
Narasumber	Sebenarnya kalau mereka sudah dapat shu maka sudah merasa aman, sudah tidak banyak neko-neko, cuman pernah ada yang menanyakan bahwa jika ada pembiayaan macet itu kan yang bayar anggota dari shu, itu yang biasanya dipertanyakan, kenapa diambil

	dari situ, kenapa tidak ditagih saja, jadi saya mengatakan bagaimana jika sudah meninggal, ini kan bebannya masih ada, jadi tiap tahun itu kami ada dana cadangan, semua pembiayaan-pembiayaan macet itu diambil dari shu, untuk menutupi ini yang bermasalah, itu yang biasanya di pertanyakn, sebenarnya ini kan untuk keberlangsungan koperasi agar tidak banyak yang bermasalah, tapi yang betul-betul memang sudah dipilah, kalau bisa ditagih kami tagih, tapi kalau jika sudah meninggal kan tidak mungkin. Cuma itu yang pernah koreksi, selebihnya tidak ada. Yang jelasnya mereka Cuma selalu bertnaya shunya masuk kapan.
--	---

Peneliti: Nur Azizah

Narasumber: Anugrah Ramadhani, S.E

Jabatan: Teller Anggota Koperasi

Waktu/Tempat: 17 April 2026/Koperasi Amanah Mulia Ikhlas

	Materi Wawancara
Peneliti	Apakah Ibu menerima laporan Sisa Hasil Usaha (SHU) setiap tahun
Narasumber	Iya, menerima
Peneliti	Bagaimana cara koperasi menyampaikan laporan dan pembagian SHU kepada anggota?
Narasumber	Laporan SHU itu disampaikan setiap tahun di saat Rapat Anggota Tahunan
Peneliti	Apakah Ibu memahami dasar atau komponen yang digunakan dalam perhitungan SHU?
Narasumber	Iya, memahami
Peneliti	Apakah anggota diberikan kesempatan untuk bertanya atau memberikan tanggapan terkait laporan SHU dalam RAT?

Narasumber	Iya ada sesi tanya jawab
Peneliti	Menurut Ibu, apakah laporan dan pembagian SHU sudah transparan dan mudah dipahami?
Narasumber	Transparan sekali, ada perhitungannya
Peneliti	Apakah pernah terdapat ketidakjelasan atau permasalahan terkait SHU?
Narasumber	Sejauh ini tidak pernah, saya sudah setahun menjadi anggota koperasi namun belum pernah
Peneliti	Apa saran Bapak/Ibu agar pengelolaan dan pelaporan SHU menjadi lebih transparan dan akuntabel?
Narasumber	Intinya bertanya saja di saat RAT karena ketua akan menjawab semua apa yang menjadi pertanyaan bagi anggota koperasi, atau datang ke koperasi bertanya langsung mengenai berapa shu yang didapatkan.

Peneliti: Nur Azizah

Narasumber: Hartati

Jabatan: Anggota Koperasi

Waktu/Tempat: 17 April 2026/Koperasi Amanah Mulia Ikhlas

	Materi Wawancara
Peneliti	Apakah Ibu menerima laporan Sisa Hasil Usaha (SHU) setiap tahun
Narasumber	Iya, menerima
Peneliti	Bagaimana cara koperasi menyampaikan laporan dan pembagian SHU kepada anggota?
Narasumber	Di saat di Rapat anggota tahunan
Peneliti	Apakah Ibu memahami dasar atau komponen yang digunakan dalam perhitungan SHU?

Narasumber	Iya, memahami
Peneliti	Apakah anggota diberikan kesempatan untuk bertanya atau memberikan tanggapan terkait laporan SHU dalam RAT?
Narasumber	Iya diberi kesempatan
Peneliti	Menurut Ibu, apakah laporan dan pembagian SHU sudah transparan dan mudah dipahami?
Narasumber	Iya transparan, karena di saat Rapat Anggota tahunan itu ditampilkan semuanya
Peneliti	Apakah pernah terdapat ketidakjelasan atau permasalahan terkait SHU?
Narasumber	Alhamdulillah selama ini belum pernah ada yang seperti itu karena selalu transparan
Peneliti	Apa saran Bapak/Ibu agar pengelolaan dan pelaporan SHU menjadi lebih transparan dan akuntabel?
Narasumber	Pembagian Sisa Hasil Usahanya, cara pengelolaannya agar lebih ditingkatkan lagi

Peneliti: Nur Azizah

Narasumber: Nurhidayah

Jabatan: Anggota Koperasi

Waktu/Tempat: 17 April 2026/Koperasi Amanah Mulia Ikhlas

	Materi Wawancara
Peneliti	Apakah Ibu menerima laporan Sisa Hasil Usaha (SHU) setiap tahun
Narasumber	Iya, menerima
Peneliti	Bagaimana cara koperasi menyampaikan laporan dan pembagian SHU kepada anggota?

Narasumber	Dalam bentuk tunai sih sebenarnya, kalau untuk kapan mengambilnya sih terserah
Peneliti	Apakah Ibu memahami dasar atau komponen yang digunakan dalam perhitungan SHU?
Narasumber	Iya, karena ada diberikan laporan rincinya, shu itu kan dihitung dari simpanan pokok dan wajib, serta berapa lama modal mengendap.
Peneliti	Apakah anggota diberikan kesempatan untuk bertanya atau memberikan tanggapan terkait laporan SHU dalam RAT?
Narasumber	Iya diberi kesempatan
Peneliti	Menurut Ibu, apakah laporan dan pembagian SHU sudah transparan dan mudah dipahami?
Narasumber	belum seenuhnya paham, hanya yang tadi saya ucapkan bahwa shu itu dari hasil tabungan atau dari dana yang mengendap
Peneliti	Apakah pernah terdapat ketidakjelasan atau permasalahan terkait SHU?
Narasumber	Insyaallah tidak, karena bisanya di luar prediksi, terkadang ketika kita berekspektasi mengenai angkanya tapi faktanya alhamdulillah terkadang banyak
Peneliti	Apa saran Bapak/Ibu agar pengelolaan dan pelaporan SHU menjadi lebih transparan dan akuntabel?
Narasumber	Harusnya itu sih setiap RAT, kan shu sebenarnya ada laporannya, mungkin lebih bagus kalau terperinci dan lebih terbuka lagi.

9. Dokumentasi Wawancara



BIODATA PENULIS



Nama lengkap penulis Nur Azizah lahir di Kamp. Baru Buttu Sawe, 12 September 2004, penulis merupakan anak pertama dari 2 bersaudara, dari pasangan Bapak Jasmin dan Ibu Nahara. Penulis bertempat tinggal di Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, jenjang pendidikan penulis dimulai dari pendidikan TK pada tahun 2009 di Satu Atap SDN 169 Duampanua dan selesai pada tahun 2010, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SDN 169 Duampanua dan selesai pada tahun 2016, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 2 Duampanua dan lulus pada tahun 2019, ditahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 8 Pinrang dan lulus pada tahun 2022. Penulis melanjutkan pendidikan S1 di Institut Agama Islam Negri (IAIN) Parepare dengan mengambil jurusan Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penulis menyelesaikan studi dengan Skripsi yang berjudul “Analaisis Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban dalam Laporan Pembagian Sisa Hasil Usaha di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang.”